



DPRD KALTARA DUKUNG BERAU GABUNG KE KALTARA

BACA HALAMAN 2



BNNP KALTARA BURU
SATU PELAKU PEMBAWA
SABU-SABU 23 KILOGRAM

BACA HALAMAN 9



Kantor DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Dukung Berau Gabung Ke Kaltara

TANJUNGSEROR - Adanya rencana penggabungan Berau ke Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menarik perhatian berbagai pihak. Salah satunya, Ketua Komisi I DPRD Kaltara, Ainun Farida.

Ia mengaku menyambut baik rencana penggabungan Berau ke Provinsi Kaltara. Sebab, dinilainya berimplikasi baik. "Dari dewan prinsipnya mendukung, artinya wilayah administrasi kita (Kaltara, red) semakin luas," ujarnya.

Menurutnya, Kabupaten Berau memiliki banyak keunggulan dan potensi yang menjanjikan. Terlebih dari sektor pariwisata. "Geliat perekonomian, pengembangan dan pelestarian seni budaya dan pembangunan infrastruktur," tuturnya.

Berdasarkan penyampaian kajian akhir, ada sejumlah ketimpangan dari sisi Kaltara, sebagai calon induk Berau ke depan. Namun, Kaltara juga memiliki potensi menjanjikan dengan berbagai mega proyek yang tengah berjalan saat ini.

Meski masih banyak ketimpangan dari beragam sisi, namun ke depan Kaltara akan semakin berkembang dengan masuknya mega proyek KIH dan PLTA. "Mega proyek ini akan mendorong dan mendorong roda perekonomian daerah," katanya.

Ainun Farida memahami, jika salah satu faktor keraguan Berau menyambut ajakan Kaltara berupa postur APBD yang tergolong kecil. Terlebih, nominal APBD Kaltara berada di bawah nominal APBD Berau.

"Tapi ke depan APBD ini bisa jauh lebih besar, seiring dengan masuknya investasi di Kaltara," paparnya.

Kendati demikian, jika dilihat dari sisi geografis antara Kaltara dan Berau cukup berdekatan. "Jadi upaya untuk menggabungkan Kabupaten Berau ke Kaltara merupakan ajakan yang tepat, tinggal kesepakatan," pungkasnya. (tin/and)

Editor: Andhika



Syarwani: Bulungan Miliki Banyak Potensi

TANJUNG SELOR - Bupati Bulungan, Syarwani memaparkan poin penting pembangunan daerah selama masa kepemimpinannya bersama wakil Bupati, Ingkong Ala. Dia mengatakan, sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Bulungan 2021-2026, dengan Visi mewujudkan Bulungan berdaulat pangan, maju dan sejahtera.

"Bulungan memiliki potensi kawasan ketahanan pangan lebih dari 30 ribu hektare, di wilayah Tanjung Buka yang merupakan wilayah pasang surut. Saat ini, luas lahan efektif sebesar 10 ribu hektare yang meliputi wilayah Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Tanjung Selor, dan Tanjung Palas Utara," ungkap Syarwani.

Selain itu, kata Syarwani, di Bulungan juga memiliki potensi buah lokal yang terus dikembangkan. Selama ini kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 14,70 persen.

"Sektor pertanian, perikanan dan kehutanan mampu menyerap tenaga kerja terbesar kedua setelah usaha pertambangan dan penggalian sebesar 32,78 persen. Dalam jangka waktu 4 tahun terakhir tingkat pertumbuhan PDRB sektor pertanian menunjukkan pertumbuhan yang signifikan selalu meningkat dengan rata-rata pertumbuhan adalah 15,89 persen," terangnya.

Sedangkan, untuk menciptakan komoditas unggulan, saat ini tiap wilayah kecamatan atau desa ditetapkan jenis komoditasnya sesuai potensi yang ada. Sehingga tiap desa atau kecamatan terdapat sentra-sentra komoditas tertentu.

Diantaranya, yang telah berjalan sentra kakao di Kecamatan Tanjung Palas, sentra kopi di kecamatan Peso, sentra lada di Kecamatan Tanjung



Bupati Bulungan, Syarwani paparkan potensi keunggulan daerah.

Palas Timur, sentra perikanan di Tanjung Palas Tengah, sentra pangan (palawija) di desa Sajau Hilir, Tanjung Buka, dan Panca Agung, Sedangkan sentra ternak sapi di desa Karang Agung, sentra kambing dan babi di desa Apung.

"Hal tersebut dilakukan Pemkab Bulungan ditengah keterbatasan anggaran agar tiap program yang dijalankan berjalan efektif dan efisien," tegasnya.

Untuk mencapai misi besar kedaulatan pangan Kabupaten Bulungan, disusunlah beberapa program prioritas, diantaranya program Mandau Tani, satu desa satu produksi, jaminan hasil produksi pertanian, hingga Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE).

Bupati menjelaskan, mandau tani merupakan Integrasi program pertanian dalam artian luas untuk mewujudkan Bulungan berdaulat pangan

berbasis kearifan lokal. Program ini bertujuan untuk melakukan pengelolaan terpadu hulu-hilir pada aspek kelembagaan.

Satu desa satu produk, mengupayakan tiap desa memiliki produk unggulan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan mendukung pengembangan pangan lokal, sesuai dengan potensi dan klasterisasi wilayah.

Sedangkan untuk jaminan hasil produksi pertanian, memberikan kepastian pembelian terhadap hasil produksi. Sehingga upaya memperoleh produk unggulan berbasis potensi wilayah dapat terpenuhi, termasuk gerakan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

"TAKE merupakan program manifestasi dari kepedulian Pemkab Bulungan dalam melestarikan lingkungan hidup," pungkasnya. (adv/tin/and)



Sri Kumalasari saat menyerahkan notulen R-APBD Fraksi Golkar DPRD Berau.

Fraksi Golkar Pembangunan Dapat Merata

TANJUNG REDEB - Fraksi Golkar menyetujui Raperda APBD Berau 2024 dijadikan Perda. Namun, ada beberapa catatan yang diberikan kepada pemerintah daerah.

Juru Bicara Golkar, Sri Kumalasari dalam rapat paripurna pandangan akhir fraksi mengungkapkan, Aparatur Sipil Negera (ASN) harus lebih semangat dalam melayani masyarakat.

Selain itu, penyertaan modal kepada perusahaan daerah diharapkan berkinerja dengan baik dan profesional sehingga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Dengan pendapatan yang cukup signifikan semoga peningkatan pelayanan terhadap masyarakat kita

semakin baik demi kesejahteraan,” ungkapnya.

Ditegaskannya, dengan meningkatnya anggaran, pasti semakin banyak pula belanja untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar seperti penyediaan air bersih, jaringan komunikasi dan lain-lain.

“Seluruh OPD dalam pelaksanaan APBD 2024 harus optimal dalam penyerapan anggaran,” katanya.

Ia menilai, pengawasan juga harus dilakukan, sehingga pelaksanaan APBD tahun 2024 sesuai dengan rencana dan arahan kebijakan pembangunan daerah. “Berdasarkan masukan dan rekomendasi tersebut, Fraksi Golkar Berau menyetujui R-APBD tahun anggaran 2024 ditetapkan

peraturan daerah Kabupaten Berau dengan porsi total pendapatan Rp 4,271 Triliun lebih,” tuturnya dalam rapat paripurna.

“Yang Terdiri dari pendapatan asli daerah Rp 254 Miliar lebih, dana pendapatan transfer Rp 4,10 Miliar lebih. Total belanja Rp 719 miliar,” sambungnya.

Sri Kumalasari berharap, besarnya APBD Berau Tahun 2024 mendatang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Berau. “Tentunya kita menginginkan peningkatan pembangunan merata dan pertumbuhan ekonomi masyarakat kita juga berdampak baik,” tandasnya. (adv/and)

Harus Dikaji, Soal Tawaran Berau Gabung Kaltara



Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong

TANJUNG REDEB - Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong pada Senin (6/11/2023) lalu menghadiri diskusi laporan akhir rencana penggabungan Berau dengan Kaltara di Tanjung Selor.

Dirinya menilai, wacana itu cukup menarik untuk didiskusikan ke depan. "Kami apresiasi inisiasi dari Kaltara. Dalam hal wacana penggabungan Kabupaten Berau masuk Kaltara," ucapnya.

Dia juga menegaskan, bahwa kehadirannya dalam kegiatan tersebut hanya melihat dan mendengarkan wacana penggabungan Kabupaten Berau ke Kaltara sesuai kajian akademis Pemprov Kaltara. "Kami hanya anggota DPRD, representatif ada di tangan masyarakat," sebutnya.

Adapun kesimpulan yang didapatkan dari hasil diskusi tersebut akan disosialisasikan kepada masyarakat di Berau. Setelah itu melihat respons mereka. Kabupaten Berau pun bakal

menyusun kajian akademis terkait visi misi kepentingan Bumi Batiwak-kal tersebut di Kaltara.

"Kemudian dari sisi kepentingan Kabupaten Berau sendiri. Itu kita juga akan melakukan kajian akademisi pula itu yang akan kita diskusikan di tingkat Kabupaten Berau bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, Pemkab Berau," bebernya.

Dia menilai hal itu bakal butuh proses waktu yang cukup lama. Pasalnya keputusan tersebut juga bersifat sakral. Apalagi ajakan bergabung ke Kaltara itu sudah wacana sejak lama. Pasti ada pandangan positif dan negatifnya. Pun keuntungan yang bisa didapatkan kedua daerah.

Sebab selama ini Kabupaten Berau yang masih menjadi bagian Provinsi Kalimantan Timur, ada beberapa faktor unggulan harus diperjuangkan. "Seperti kita ini menjadi salah satu penyangga IKN yaitu pada sektor pariwisata," pungkasnya. (adv/and)

Pastikan Lahan yang Dikelola Perusahaan Miliki Amdal

TANJUNG REDEB - Masih banyaknya lahan yang tidak memiliki izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) disorot Anggota Komisi II DPRD Berau, Rahman.

Dia mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau harus memberi peringatan tegas melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

"Seharusnya pengelolaan lahan tanpa izin Amdal segera ditangani. Jangan dibiarkan begitu saja, karena menjadi dampak negatif bagi masyarakat," ungkapny.

Dirinya menegaskan, OPD terkait harus dapat memastikan lahan yang dikelola setiap perusahaan sesuai dengan peraturan dan komitmen untuk lingkungan masyarakat.

"Jangan hanya mau mengambil sumber daya alam saja, tapi tidak bisa menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya, termasuk bagaimana komitmen perusahaan dalam mengelola lahan pasca dilakukan pertambangan," ucapnya.

Dikatakan Rahman, saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak perusahaan yang melakukan pengelolaan lahan namun tidak mengutamakan Amdal dalam pelaksanaannya.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, dirinya menyebut, pihaknya akan menjadwalkan pertemuan bersama pihak DLHK dan terkait lainnya untuk membahas hal tersebut lebih lanjut.

"Kami berharap DLHK lebih serius terhadap persoalan ini dan kami juga akan melakukan pembahasan hal ini lebih lanjut jika nanti sudah ada waktunya," pungkasnya. (adv/and)



Anggota Komisi II DPRD Berau, Rahman

Kembali Dorong Penyelesaian Tapal Batas Antara Berau dan Kutim



Anggota Komisi II DPRD Berau, Darlena

TANJUNG REDEB - Jeritan para petani yang tinggal di perbatasan antara Berau dan Kutai Timur (Kutim) kembali disuarakan Anggota Komisi II DPRD Berau, Darlena.

Ia membeberkan, persoalan tapal batas di wilayah tersebut hingga saat ini belum juga selesai. Karena hal itu, para petani tidak menikmati hasil kebun milik sendiri.

"Karena lahannya dirampas oleh Kutim dengan cara paksa. Dan itu telah berlangsung beberapa tahun belakangan ini," ungkapnya.

Selain itu, Ia juga kerap menerima keluhan dari para petani karena mereka sering diintimidasi. Dimana mayoritas mereka merupakan petani sawit. Jika persoalan tapal batas ini tak kunjung ada kejelasan mereka yang dirugikan.

"Pihak Kutim mengatakan itu lahan mereka. Sedangkan, berdasarkan aturan yang berlaku, lahan itu milik Berau," tuturnya.

Darlena meminta Pemkab Berau bisa tegas untuk menuntaskan permasalahan tapal batas ini. Sebab, lahan di sana sudah diakui oleh Kutim dengan cara memasang tapal batas. "Kami hanya memfasilitasi sebagai wakil rakyat, karena penentu kebijakan tetap kepala daerah," tandasnya. (adv/and)

APBD Berau 2024 Sentuh Rp 4 Triliun, Imbau OPD Optimalkan Kinerja

TANJUNG REDEB - Dalam rapat paripurna pandangan akhir fraksi pada Selasa (7/11/2023) lalu, Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Berau, Suharno menyatakan pihaknya setuju dengan R-APBD tahun 2024.

Menurutnya, hal yang penting dalam rangka penyesuaian anggaran harus sepadan dengan kondisi keuangan daerah. Hal tersebut untuk meningkatkan semangat dalam mengangkat konsep mendorong ke arah pencapaian visi Kabupaten Berau suatu langkah tepat dalam pelaksanaan misi berbasis kinerja dan berkarakter.

"Dengan APBD sebesar Rp 4 Triliun lebih, maka kami dari fraksi PPP mengimbau seluruh SKPD agar dapat mengoptimalkan kinerjanya supaya dengan waktu yang ada serapan anggaran yang diusulkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," ungkap Suharno.

Selain itu, pihaknya juga mendorong semua pihak untuk melaksanakan pembangunan secara optimal. Dengan catatan, tetap memanfaatkan poten-



Anggota Fraksi PPP DPRD Berau, Suharno dalam rapat paripurna pandangan akhir fraksi.

si sumber daya yang tersedia secara sinergi dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi terutama pada Dinas PUPR Berau dan OPD yang lainnya dalam serapan belum maksimal.

Menurutnya, tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak

berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun, sehingga tujuan dari penganggaran harus dipahami oleh perumus kebijakan anggaran, yaitu anggaran harus berbasis kinerja dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat.

"Harapan kami setelah ditetapkannya rancangan APBD tahun anggaran 2024 ini agar dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan kemampuan pendapatan serta didukung oleh pembiayaan yang sehat sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan daerah, serta pembangunan di berbagai sektor di Kabupaten Berau," tuturnya.

"Kami dari fraksi PPP, mengingatkan kepada Pemkab Berau sesuai dengan janji pada waktu kampanye yaitu pembangunan dimulai dari pinggiran, di kota hanya pembenahan. Dengan segala kritik dan saran di atas semoga Pemkab Berau dapat lebih berbenah dalam melaksanakan programnya ke depan," pungkasnya. (adv/and)



ADE/MKR

Kepala Bidang (Kabid) PMK Kota Tarakan, Eko Puguh Santoso.

PMK Tangani 197 Kasus ODNK, Didominasi Laporan Ular

TARAKAN - Sepanjang Januari hingga Oktober 2023, Pemadam Kebakaran menangani 197 kasus Operasi Darurat Non Kebakaran (ODNK). Diketahui, laporan yang mendominasi mengenai penanganan ular.

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kota Tarakan, Eko Puguh Santoso menerangkan, pada triwulan pertama periode Januari hingga Maret 2023, ada 12 kasus penanganan ular.

"Delapan di antaranya merupakan ular berbisa, sedangkan empat lainnya tidak berbisa," jelasnya.

Di triwulan kedua, bulan April hingga Juni, evakuasi ular masih yang tertinggi. Ular berbisa 14 kasus dan ular tidak berbisa 10 kasus. Terakhir di triwulan ke 3 dari Juli hingga September ular yang berbisa terdapat 15 kasus dan tidak berbisa 20 kasus. "Memang benar mayoritas terbesar di sini masih terkait dengan ular," bebernya.

Eko menyebut, sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pe-

doman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, PMK tidak hanya melakukan tugas terkait layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran saja, namun juga tugas dalam hal penyelamatan jiwa.

"Kita melaksanakan evakuasi binatang berbahaya sesungguhnya bukan mengevakuasi binatangnya tetapi mengevakuasi ancaman binatang ini terhadap keselamatan jiwa manusia," ujarnya.

Dari tahun ke tahun kasus ODNK yang ditangani oleh PMK semakin meningkat dan jenisnya pun cukup banyak. Tak hanya mengevakuasi hewan berbahaya, bahkan PMK juga pernah menangani kasus cincin yang tidak bisa terlepas dari jari si pengguna.

Melihat evakuasi ular yang masih tinggi di Tarakan, menurut Eko, diperlukan evaluasi bersama tidak hanya dari PMK namun juga masyarakat. Sebab ular berkaitan dengan rantai makanan.

Ular yang notabenehnya berhabitat di hutan sudah memasuki permukiman manusia disebabkan oleh habitat hutan sudah mulai terancam dan sumber makanan ular di hutan pun sudah mulai menipis. Sehingga mengakibatkan ular masuk permukiman untuk mencari makan.

"Ini harus menjadi evaluasi dari semua institusi, kalau dari kami pemadam fungsinya bagaimana melaksanakan penyelamatan, evakuasi. Tetapi bagaimana menata rantai kehidupan saya yakin ada instansi yang lebih berkompeten disana," terangnya.

Dia pun menghimbau masyarakat untuk segera melapor ke PMK jika mengalami kejadian binatang berbahaya yang mengancam keselamatan. "Saat kondisi darurat segera melapor kepada kami melalui pesawat call center, pemerintah kota, 112 langsung dari HP" pungkasnya. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya
Editor: Andhika



ADE/MKR

General Manager (GM) PT Pelindo Persero Regional IV Cabang Tarakan, Rio Dwi Santoso.

Kapal Indomaya Rute Tarakan-Tawau Dibuka November, Tiket Diprediksi Lebih Murah

TARAKAN - Setelah sempat tertunda karena mengalami kerusakan pada mesin, Kapal Indomaya rute Tarakan-Tawau akan segera dibuka kembali pada November 2023. Hal ini menyusul kabar bahwa perbaikan kapal hampir selesai. Demikian disampaikan General Manager (GM) PT Pelindo Persero Regional IV Cabang Tarakan Rio Dwi Santoso, Kamis (9/11/2023).

"Inshaallah November 2023 kita launching lagi. Kabar gembiranya untuk rute sekarang bisa lewat Sungai Nyamuk. Kemaren kan harus lewat Nunukan Sekang bisa lewat Sungai Nyamuk jadi perjalanannya lebih pendek," ucapnya.

Namun, Rio tak menjelaskan tanggal pasti kapan kapal akan beroperasi, mengingat masih dalam proses

perbaikan.

Kendati demikian, dia mengatakan pelayanan rute Tarakan-Tawau sudah bisa dilakukan melalui Sungai Nyamuk, sehingga jarak tempuh dan harga tiket diprediksi lebih murah.

"Berdasarkan hasil trial penyebrangan beberapa waktu lalu, estimasi waktu 4 jam lamanya. Jika perjalanan lewat Sungai Nyamuk akan memakan waktu lebih singkat," ungkapnya.

Terkait harga tiket, yang dahulunya Rp 1 juta, karena sudah bisa melalui Sungai Nyamuk maka diprediksi mengalami penurunan kurang lebih Rp 750 ribu. "Itu prediksi, harga tetap akan ditentukan oleh operator," ujarnya.

Rio menyebut Kapal Indomaya rute Tarakan-Tawau muat untuk 126

penumpang. Dia pun optimis kapal ini akan bisa beroperasi pada November 2023.

"Perbaikan hampir selesai dan perbaikannya dilakukan di Tawau, Malaysia," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Kapal Indomaya rute Tarakan-Tawau dilaunching pada (29/9/2023), hasil kesepakatan Imigrasi, Bea Cukai, operator dan pihak terkait lainnya. Namun ditunda beroperasi karena mengalami kerusakan mesin. Diketahui pula, dahulunya Kapal Indomaya rute Tarakan-Tawau sempat beroperasi namun terhenti karena terjadi pandemi Covid-19. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya

Editor: Andhika



ADE/MKR

Press rilis pengungkapan sabu-sabu 23 kg.

BNNP Kaltara Buru Satu Pelaku Pembawa Sabu-sabu 23 Kilogram

TARAKAN - Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara (BNNP) Kaltara tengah memburu satu pelaku pembawa sabu 23 Kilogram (Kg) yang berhasil diungkap Tim Gabungan Lantamal XIII bersama Bea Cukai Tarakan dan BNNP Kaltara pada Rabu (8/11/2023).

Diketahui, ada tiga orang pelaku dari pengungkapan sabu 23 kg tersebut. UW dan PU berhasil tertangkap, namun satu pelaku lainnya berhasil kabur saat dilakukan penangkapan.

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara (BNNP) Kaltara, Brigjen Pol Rudi Hartono mengatakan pelaku tersebut lolos usai melompat saat terjadi penangkapan.

"Dan satu orang sekarang masih loncat ke laut. Sampai tadi malam dicari dan rupanya tidak meninggal. Padahal kemarin Lantamal XIII sudah kerahkan personel namun tidak dapat. Ada informasi dari masyarakat mereka bergantung di perahu nelayan sampai sekarang masih dicari

mudahan selamat, ini warga Filipina tinggal di Malaysia," ucapnya di Tarakan, Rabu (8/11/2023).

Dijelaskannya, tiga orang pelaku kurir sabu tersebut memang sebelumnya menceburkan ke laut.

"Jadi semuanya menceburkan ke laut. Ini modus sebenarnya sama dengan menenggelamkan narkotik di laut tapi pakai titik koordinat. Ini indikasinya pelaku mencari sinyal HP dulu, taruh kemudian nanti ada yang mengambil. Saya baca juga yang ambil siapa, mau dikasih siapa, dimana dan yang meminta siapa, mau dikirim ke mana itu tidak bisa disampaikan. Karena masih didalami dan sat ini lagi pengejaran pihak kami, yang jelas tiga tiganya menceburkan ke laut," paparnya.

Pada saat petugas melakukan penangkapan kapal yang sedang berjalan. Kemudian pelaku menceburkan diri. "Dua tertangkap petugas sambil berteriak-teriak. Dan bahasanya tidak dimengerti pula. Bahasa tagalong. Yang berhasil kabur ini memiliki ke-

mampuan berenang cukup jauh, 10 mil lebih," katanya.

Petugas sempat mengira mereka hilang, namun pihaknya mendapatkan informasi bahwa pelaku selamat dan saat ini sedang dicari. "Ternyata kami dapat informasi dia di suatu tempat," paparnya.

Lebih lanjut dikatakan Brigjend Pol Rudi Hartono, dua pelaku merupakan pria kelahiran Filipina dan telah lama menetap di Malaysia. Adapun untuk pemeriksaan tidak mudah karena menyiapkan translator dan pengacaranya yang memahami bahasa keduanya.

"Penangkapannya masanya tiga hari. Selama 3 kali 24 jam. Ini masih masa pemeriksaan. Bahasa pasti, ada yang bisa bahasa Indonesia sedikit campur bahasa Inggris tidak jelas. Mereka struktur ada 12 dan kesulitan kita mengungkap bandar karena struktur 12, mutar-mutar," katanya. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya
Editor: Andhika



PASANG IKLAN HUBUNGI
0811 5405 033

Lebih Dekat dengan Satu Klik



2 PRIA PENGETAB BBM BERSUBSIDI DITANGKAP POLISI

BACA HALAMAN 2-3



**PRESIDEN JOKOWI
RESMIKAN PLTS
TERAPUNG
CIRATA 192 MWP
BACA HALAMAN 32-33**



Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Kaltim, AKBP I Nyoman Wijana didampingi Wadir Reskrimsus Polda Kaltim, AKBP Rakei Yunardhani menunjukkan barang bukti dan tersangka.

2 Pria Pengetab BBM Bersubsidi di Samboja Ditangkap Polisi

BALIKPAPAN-Polda Kaltim melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) menangkap dua orang pria berinisial R (47) dan J (37) warga Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur beserta sejumlah

barang bukti kejahatannya.

Kedua pria tersebut diduga telah melakukan pengetaban BBM bersubsidi jenis Pertalite dari SPBU Kilometer 28 Samboja. Bahkan saat ditangkap, turut diamankan dua unit mobil

dan di dalamnya terdapat 18 jeriken di masing-masing mobil.

Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Kaltim, AKBP I Nyoman Wijana didampingi Wadir Reskrimsus Polda Kaltim, AKBP Rakei Yunardhani men-



gatakan, dari hasil pengungkapan ini polisi berhasil menggagalkan penyalahgunaan BBM bersubsidi Pertalite sebanyak 780 liter.

“Selain dua orang tersangka yang kita amankan, kita juga amankan barang bukti berupa satu unit mobil Avanza dengan 18 jerigen dan mesin pompa mini, juga satu unit mobil Sigras dengan 18 jerigen dan mesin pompa mini,” ujarnya Kamis (9/11/2023).

Lebih lanjut Nyoman menjelaskan, dari masing-masing mobil juga diamankan BBM subsidi jenis Pertalite sebanyak 600 liter dari Sigras dan 180 liter dari Avanza, sehingga totalnya sebanyak 780 liter.

“Modus operandi dari kedua tersangka dengan mengantre untuk

membeli BBM jenis Pertalite di SPBU kilometer 28 Kecamatan Samboja secara berulang kali,” jelasnya.

Dari pemeriksaan yang dilakukan penyidik Ditreskrimsus Polda Kaltim, diketahui keduanya telah melancarkan aksinya selama satu tahun. Dan telah meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah.

“Dia beli dengan harga di SPBU, kemudian dijual ke pemilik Pom Mini dengan keuntungan Rp 2.000 per liter. Sudah dilakukan oleh keduanya selama setahun ini,” ujar Wadir Reskrimsus Polda Kaltim, AKBP Rakei Yunardhani.

Dalam aksinya, kedua pelaku membeli BBM secara normal, namun setelah keluar dari SPBU langsung memindahkan BBM dari tangki mobil

ke jeriken yang ada di dalam mobil menggunakan mesin pompa mini.

“Kedua tersangka dijerat Pasal 40 angka 9 UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU atas perubahan ketentuan pasal 55 UU Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 60 miliar,” tutup Rakei Yunardhani.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



Jumat, 10 November 2023

DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



**PANGAN LOKAL
DAPAT CEGAH
STUNTING & OBESITAS**



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN



<http://dinkes.kaltimprov.go.id>

Dra. Sri Wahyuni M.P.P.
SEKDA PROV. KALTIM

Dr. Akmal Malik, M.Si
PD GUBERNUR KALTIM

dr. H. Jaya Mualimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
KEPALA DINAS KESEHATAN KALTIM



PANGAN LOKAL DAPAT CEGAH STUNTING & OBESITAS

SAMARINDA- Stunting dan obesitas adalah ancaman ganda yang berpengaruh pada kesehatan dan kesejahteraan di Kaltim. Hal ini menjadi sorotan tersendiri bagi Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur.

"Kasus stunting dan obesitas terjadi pada waktu yang bersamaan. Kondisi ini mempunyai dampak sangat merugikan, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi produktivitas ekonomi dalam jangka pendek maupun jangka panjang," jelas Kepala Dinkes Kaltim dr. Jaya Mualimin, Senin (6/11/2023).

Lanjut Jaya, kasus stunting tidak hanya terkait dengan pertumbuhan tinggi badan yang kurang sesuai dengan umur (stunted) tetapi lebih mengkhawatirkan juga pada perkembangan sel otak yang akhirnya menyebabkan tingkat kecerdasan menjadi tidak optimal.

"Kemampuan kognitif anak dalam jangka panjang akan lebih rendah dan akhirnya ketika sudah memasuki usia produktif, mereka

akan mengalami penurunan produktivitas kerja yang akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan dapat menimbulkan permasalahan sosial budaya dalam jangka panjangnya," ujarnya.

Menurut Jaya, obesitas atau kelebihan berat badan juga berisiko menyebabkan berbagai penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, jantung, stroke, dan kanker. Penyakit-penyakit ini tidak hanya menurunkan kualitas hidup, akan tetapi juga membutuhkan biaya pengobatan yang tinggi.

"Karena itu kita harus mencegah dan menangani masalah stunting dan obesitas dengan cara meningkatkan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi seimbang, berolahraga secara teratur, dan menghindari rokok dan alkohol," bebernya.

Jaya juga mengajak semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, agar bersinergi dalam mengatasi ma-

salah gizi di Kaltim.

Kemudian, meminta kepada masyarakat memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah di provinsi Kaltim untuk melawan gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi (stunting).

"Pangan dari SDA lokal, seperti tanaman pangan lokal, buah-buahan, sayuran, ikan, daging, telur, susu, dan lain-lain amat baik untuk memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang," imbuhnya.

Hal itu berguna untuk menghindari anak dari dampak obesitas yang berbuntut pada biang penyakit di masa yang akan datang. Oleh karena itu orang tua mesti memahami pemberian gizi yang seimbang kepada buah hatinya.

"Kami berharap dengan upaya bersama, angka stunting dan obesitas di provinsi ini dapat diturunkan secara signifikan," pungkasnya. **(ADV/nta)**

Pewarta : Ernit

Editor : Nicha Ratnasari



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN



<http://dinkes.kaltimprov.go.id>

Dra. Sri Wahyuni M.P.P.
SEKDA PROV. KALTIM

Dr. Akmal Malik, M.Si
PD GUBERNUR KALTIM

dr. H. Jaya Maulimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
KEDALA DINAS KESEHATAN KALTIM



puskesmas di seluruh Kaltim wajib terapkan SISRUITE. (Istimewa)

SISRUITE DITARGET RAMPUNG 2024

SAMARINDA- Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) di seluruh kabupaten dan kota menerapkan Sistem Rujukan Terpadu (SISRUITE). Sehingga Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menargetkan pada 2024 mendatang.

"SISRUITE adalah sistem yang mengatur alur rujukan pasien dari Puskesmas ke rumah sakit atau sebaliknya. Sistem itu juga menyediakan informasi tentang ketersediaan tempat tidur, dokter, spesialis, dan alat kesehatan," jelas Kepala Dinkes Kaltim Jaya Maulimin, Senin (23/10/2023)

Lebih lanjut, tujuan dari SISRUITE adalah peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat, khususnya mereka yang berada di daerah terpencil, atau sulit dijangkau.

Peningkatan pelayanan kesehatan primer berupa pembinaan praktik mandiri dokter,

atau dokter gigi sesuai standar layanan di kabupaten dan kota pada 2024.

Kemudian, target peningkatan Puskesmas yang menghadirkan pelayanan kedokteran keluarga layanan primer sebesar 20 persen dari 188 puskesmas.

"Kami upayakan semua kabupaten dan kota melaksanakan pembinaan dan bimtek terhadap klinik di wilayah kerja mereka agar sesuai standar," ujarnya.

Jaya juga menyatakan Unit Transfusi Darah (UTD) di Puskesmas mendapatkan pembinaan sesuai standar pelayanan transfusi darah ditargetkan meningkat 15 persen.

"Saya berharap dengan target-target itu, kami dapat membangun sistem kesehatan yang lebih baik dan lebih manusiawi di Kaltim," pungkasnya. (adv)

Pewarta : Ernit

Editor : Nicha Ratnasari



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN



<http://dinkes.kaltimprov.go.id>

Dra. Sri Wahyuni M.P.P.
SEKDA PROV. KALTIM

Dr. Akmal Malik, M.Si
PD GUBERNUR KALTIM

dr. H. Jaya Mualimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
KEPALA DINAS KESEHATAN KALTIM



Cacar Monyet belum masuk ke Kaltim. (Istimewa)

INI STRATEGI DINKES KALTIM CEGAH CACAR MONYET

SAMARINDA- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur (Kaltim) mengimbau untuk waspada terhadap penyebaran penyakit cacar monyet di Kaltim. Meski hingga saat ini kasus cacar monyet belum ada di Kaltim.

"Kalau laporan sampai hari ini belum ada masuk cacar monyet," jelas Kepala Dinkes Kaltim Dr Jaya Mualimin, Rabu (25/10/2023).

Pihak Dinkes kini meningkatkan kewaspadaan meminta Dinkes Kabupaten/Kota untuk setiap minggunya melaporkan sebaran cacar monyet tersebut.

"Setiap minggu kita menerima laporan ada atau tidaknya untuk kewaspadaan dini dari Dinkes Kabupaten kota. Kalau ada terindikasi ada pasien dirawat atau ditemukan sebaiknya dilaporkan untukantisipasi," ujarnya.

Diketahui, cacar monyet ini yang penyebarannya melalui vi-

rus adalah jenis penyakit yang dapat menyerang kulit. Bentuknya bintik-bintik seperti cacar, namun ukurannya lebih lebar. Menurut laporan epidemiologi penyebarannya cepat menular.

Jaya mengatakan, cara penyembuhan itu menggunakan obat cacar pada umumnya. Masyarakat ada yang terpapar untuk tidak panik, bisa dibawa ke Puskesmas. Dan virus tersebut tidak lama.

"Obatnya hampir mirip. Dan virus itu tidak lama, seperti halnya DBD itu seminggu saja, Corona itu 14 hari, setelah itu hilang. Yang bahaya itu kalau menularkan, apalagi tertularnya melalui perilaku seksual," ungkapnya.

Berdasarkan pemantauan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 26 September 2023. Sekitar 83 persen diamat pada laki-laki penyuka laki-laki. 7,4 persen pernah dites HIV positif, kemudian

kasus yang dilaporkan penularan melalui seks 82,5 persen. Ada kedekatan dengan orang yang suka berganti pasangan.

"Gejala ringan bisa jadi berat cuma kematiannya 3-5 persen saja. Kontak langsung dengan orang terkena atau hewan dan juga benda yang terinfeksi oleh virus bisa saja," imbuhnya.

Jaya meminta untuk masyarakat jika terpapar oleh cacar, untuk segera ambil tindakan. "Begitu ada kasus akan ambil sampel darah dan diperiksa. Kalau positif mungkin cacar lain. Kalau positif berarti mpox sudah masuk di Kaltim. Jika ada kita lakukan upaya pertama, lokalisir orang yang kena, kita obati dan kita cegah dari semua pintu masuk Kaltim," pungkasnya. **(ADV/nta)**

Pewarta : Ernit

Editor : Nicha Ratnasari



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN



<http://dinkes.kaltimprov.go.id>

Dra. Sri Wahyuni M.PP
SEKDA PROV. KALTIM

Dr. Akmal Malik, M.Si
PD GUBERNUR KALTIM

dr. H. Jaya Maulimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
KETUA DINAS KESEHATAN KALTIM



KEBIJAKAN RPJMN HARUS SEJALAN LAYANAN PRIMER

BALIKPAPAN – Pada event Workshop Manajemen Integrasi Layanan Primer yang digelar Dinkes Kaltim di Ballroom Hotel Senyur, Kadinkes Kaltim Jaya Maulimin menjelaskan mengenai pergerakan dari layanan primer atau Puskesmas saat ini.

Dikatakan, transformasi layanan primer sejalan dengan arah kebijakan dan strategi bidang kesehatan yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024. Yaitu, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.

“Terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar atau Primary Health Care dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi,” ucap Kadinkes.

Ia menyebut, transformasi layanan primer difokuskan untuk meningkatkan layanan promo-

tif dan preventif. Misalnya, seperti memperkuat upaya pencegahan, deteksi dini, promosi kesehatan, membangun infrastruktur, melengkapi sarana, prasarana, SDM, serta memperkuat manajemen di seluruh layanan primer di tanah air.

Poin lain, perubahan mendasar pada transformasi layanan kesehatan primer terletak pada desain layanan yang difokuskan pada kelompok sasaran (people center) yang diberikan sampai ke tingkat dusun dan keluarga.

“Pada level kecamatan, desain ini memberikan paket layanan untuk masing-masing siklus hidup di berbagai tingkatan layanan kesehatan yang ada di Puskesmas, baik pelayanan di dalam gedung maupun luar gedung,” paparnya.

Menurutnya, pelayanan dalam gedung akan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai siklus kehidupannya.

Pelayanan yang semula berbasis program akan berubah men-

jadi berbasis siklus kehidupan sebagai platform integrasi layanan kesehatan.

“Secara umum pelayanan di Puskesmas akan terbagi menjadi 4 klaster yaitu Klaster Manajemen, Klaster Ibu Hamil hingga Remaja, Klaster Usia Produktif dan Lansia, dan Klaster Penanggulangan Penularan Penyakit,” sebutnya.

Perubahan itu akan mendekatkan layanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun serta memperkuat pemantauan wilayah setempat melalui pemantauan dengan dashboard situasi kesehatan di setiap desa.

“Pada level Desa akan dirancang model Desa melalui Posyandu Prima yang memiliki jejaring berupa kegiatan layanan kesehatan dalam bentuk kegiatan Posyandu di tingkat Dusun,” tutupnya. (adv/dinkes)

Pewarta : Adhi Abdhia
Editor : Nicha Ratnasari



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN



Dra. Sri Wahyuni M.PP
SEKDA PROV. KALTIM

Dr. Akmal Malik, M.Si
TD GUBERNUR KALTIM

dr. H. Jaya Maulimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
KETUA DINAS KESEHATAN KALTIM



<http://dinkes.kaltimprov.go.id>



Budaya Makan Bersama Harus Dikembangkan dalam Keluarga. (Istimewa)

Cegah Stunting dengan Posyandu & Pola Makan Sehat

SAMARINDA - Dalam upaya mencegah stunting atau gangguan pertumbuhan pada anak, Posyandu dan pola makan sehat memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan. Hal ini diungkapkan oleh Analis Gizi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim, Uzah Maria Ulfah.

"Kebiasaan pola makan sehat harus diterapkan sejak dini oleh orang tua dan sekolah. Anak-anak perlu diberikan makanan yang bergizi dan beragam, serta membawa bekal dari rumah," ungkap Uzah pada Jumat (20/10/2023).

Uzah juga mengingatkan orang tua untuk lebih peka terhadap kondisi anak mereka dan segera mengatasi masalah jika terdeteksi.

Menurutnya, budaya makan bersama dalam keluarga juga memiliki peran yang penting, meskipun sekarang ini semakin berkurang karena kesibukan orang tua. Makan bersama setidaknya satu kali dalam sehari

adalah kebiasaan yang seharusnya dijaga dalam sebuah keluarga.

Selanjutnya, Uzah juga menekankan pentingnya Posyandu sebagai langkah pertama dalam mendeteksi masalah gizi pada anak.

"Masyarakat harus menyadari bahwa Posyandu adalah milik bersama dan harus dimanfaatkan dengan baik. Jika ada anak yang sakit, memiliki masalah kesehatan, atau masalah dalam pola makan, mereka bisa dibawa ke Posyandu," tambahnya.

Lebih lanjut, sebagai bagian dari pembinaan tenaga kesehatan di Posyandu, Dinkes Kaltim menyarankan adanya pengaturan yang tepat mengenai SDM (Sumber Daya Manusia) dari puskesmas setempat.

"Sebagai contoh, jika ada daerah yang menghadapi masalah gizi, kami bisa memberikan edukasi yang lebih intensif," tutupnya. **(Nta/ADV)**



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN



<http://dinkes.kaltimprov.go.id>

Dra. Sri Wahyuni M.PP
SEKDA PROV. KALTIM

Dr. Akmal Malik, M.Si
TD GUBERNUR KALTIM

dr. H. Jaya Mualimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
KEPALA DINAS KESEHATAN KALTIM



Dinkes Kaltim telah siapakan layanan konseling. (Istimewa)

LAYANAN KONSELING BAGIAN DARI FASKES TINGKAT PERTAMA

SAMARINDA- Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyediakan layanan konseling pada fasilitas kesehatan (Faskes) di tingkat pertama, yakni Puskesmas dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), agar meningkatkan kesehatan mental masyarakat.

"Layanan konseling sangat penting untuk mencegah dan menangani masalah mental, contoh depresi, stres, dan bunuh diri," ungkap Kepala Dinkes Kaltim Dr Jaya Mualimin, Senin (23/10/2023).

Ditambahkannya, faskes tingkat pertama mempunyai ruang konseling yang bisa memberikan bantuan psikologis kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan keluarga dan reproduksi.

"Kita juga akan bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DKP3A) agar mengintegrasikan layanan konseling di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Puspagi)," bebernya.

Kemudian, untuk rumah sakit yang telah direkomendasikan oleh Dinkes Kaltim yakni Rumah sakit Atma Husada, yang memiliki fasilitas dan tenaga ahli yang memadai untuk menangani terkait kesehatan mental.

Jaya menuturkan, Dinkes Kaltim belum memiliki data resmi mengenai angka bunuh diri di Kaltim. Akan tetapi, prihatin dengan beberapa kasus bunuh diri yang terjadi akhir-akhir ini, terutama di jembatan.

"Kita akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memberikan upaya pencegahan dan perlindungan terhadap masyarakat yang berpotensi melakukan bunuh diri," kata Jaya.

Salah satu caranya, dengan memasang jaring kawat di jembatan-jembatan yang rawan menjadi lokasi bunuh diri.

"Kita juga akan meningkatkan literasi masyarakat tentang bahaya bunuh diri dan cara mengatasinya," pungkasnya. (adv)

Pewarta : Ernit

Editor : Nicha Ratnasari



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN



<http://dinkes.kaltimprov.go.id>

Dra. Sri Wahyuni M.P.P.
SEKDA PROV. KALTIM

Dr. Akmal Malik, M.Si
TD GUBERNUR KALTIM

dr. H. Jaya Maulimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
KEDALA DINAS KESEHATAN KALTIM



Analisis Gizi Dinkes Kaltim Uzah Maria Ulfah. (Istimewa)

CEGAH STUNTING SEJAK DINI

SAMARINDA- Analisis Gizi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur (Kaltim) Uzah Maria Ulfah menuturkan pencegahan terhadap stunting atau gagal tumbuh dilakukan sejak calon ibu masih pada fase pra nikah dan masa remaja.

"Stunting adalah kondisi ketika tinggi badan anak lebih pendek dari standar usianya akibat dari kurangnya gizi dalam jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau pada masa pertumbuhan anak," jelas Uzah, Rabu (18/10/2023).

Uzah juga mengatakan, Dinas Kesehatan telah menyediakan tablet penambah darah sebagai pencegahan anemia dan stunting yang didistribusikan ke Puskesmas dan sekolah melalui unit kesehatan sekolah (UKS).

Untuk tablet penambah darah diberikan secara gratis.

Ia mengemukakan pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin di posyandu atau Puskesmas guna mendeteksi dini

kondisi ibu dan janin.

"Di Puskesmas ada USG untuk mengecek kondisi janin, apakah ada masalah atau tidak. Ada juga alat antropometri untuk mengukur tinggi dan berat badan ibu secara digital," ujarnya.

Lebih lanjut, edukasi dari orang tua kepada anak sejak dini harus dibiasakan makan yang sehat. Orang tua harus memberikan contoh dan mengawasi asupan nutrisi anak.

"Jangan biarkan anak terpapar asap rokok atau makan bersama keluarga yang merokok," imbuhnya.

Terlepas itu, stunting adalah masalah yang melibatkan banyak sektor, tidak hanya kesehatan, tetapi juga pendidikan, sosial, ekonomi, dan lingkungan.

"Semua pihak harus bersama-sama mencegah dan menangani stunting. Ini adalah tanggung jawab bersama untuk menciptakan generasi yang sehat dan cerdas," pungkasnya. **(adv)**

Pewarta : Ernita

Editor : Nicha Ratnasari



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN



<http://dinkes.kaltimprov.go.id>

Dra. Sri Wahyuni M.PP
SEKDA PROV. KALTIM

Dr. Akmal Malik, M.Si
PD GUBERNUR KALTIM

dr. H. Jaya Maulimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
KEPALA DINAS KESEHATAN KALTIM



Dinkes Kaltim Fokus pada Implementasi Kebijakan GERMAS. (Istimewa)

LOMBA KTR UNTUK PENINGKATAN KEBIJAKAN GERMAS

SAMARINDA - Penyuluh Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur (Kaltim) sedang memusatkan perhatian pada pelaksanaan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di Kabupaten dan Kota di seluruh Kaltim.

"Kebijakan Germas telah ada sejak tahun 2019, dan implementasinya menjadi hal yang sangat penting," ungkap Edy pada Jumat (20/10/2023).

Pemeriksaan kesehatan rutin adalah salah satu aspek dari kebijakan Germas. Misalnya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin setidaknya enam kali dalam setahun.

"Kita harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya dihasilkan tetapi juga dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, saat ini kami fokus pada implementasi kebijakan Germas yang telah ada," tambahnya.

Kebijakan Germas juga berlaku di bidang pendidikan, termasuk di PAUD dan SD. Ini mencakup kampanye minum susu, menjaga pola

gizi yang seimbang, dan memastikan anak-anak mendapatkan sarapan pagi di sekolah.

Edy juga mengumumkan bahwa dalam waktu dekat, mereka akan mengadakan Lomba Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai bagian dari program Germas. Lomba ini bertujuan untuk mengawasi dan membina OPD agar bebas dari asap rokok.

"Penilai lomba akan berasal dari Dinkes sendiri, yang akan berkolaborasi dengan berbagai pihak dan melibatkan satgas khusus. Lomba ini akan diadakan setiap tahun sebagai upaya pembinaan untuk mendukung kebijakan yang telah diterbitkan," tambahnya.

Melalui kebijakan dan lomba Germas ini, Edy berharap masyarakat Kaltim akan menjadi lebih sadar dan peduli terhadap kesehatan diri mereka sendiri dan juga lingkungan sekitar.

"Kami ingin memberikan contoh kepada kabupaten dan kota, dan kami juga akan menerapkannya. Setiap daerah akan membentuk satgasnya sendiri dan tim penilai KTR," tutupnya. **(Nta/ADV)**



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN



<http://dinkes.kaltimprov.go.id>

Dra. Sri Wahyuni M.P.P.
SEKDA PROV. KALTIM

Dr. Akmal Malik, M.Si
PD GUBERNUR KALTIM

dr. H. Jaya Muallimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
KEDALA DINAS KESEHATAN KALTIM



Dinkes Kaltim turut memerangi narkoba masuk ke kalangan anak dibawah umur

Dinkes Kaltim Sebut Bahaya Narkoba Bisa Sebabkan Kematian

SAMARINDA- Bidang Kefarmasian Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur (Kaltim) Padliansyah menghadiri pemusnahan barang bukti di BNNP Kaltim.

Ia mengatakan, pengaruh umum pada fisik bagi pengguna narkoba dapat menyebabkan kerusakan fisik yang serius.

"Pengguna opioid bisa menyebabkan overdosis, penurunan fungsi pernapasan, dan kematian," ujar Padliansyah, Selasa (7/11/2023).

Penyebaran narkoba telah mengincar semua kalangan, baik anak-anak dibawah umur maupun dewasa. Dinkes Kaltim memiliki peran penting untuk memerangi bahaya dari penyebaran narkoba tersebut.

"Tentu sangat prihatin jika narkoba ini

sampai masuk ke kalangan anak-anak apalagi dibawah umur. Dinkes Kaltim juga akan ikut turun tangan dalam mencegah narkoba ini dalam penyebar luasannya," bebernya.

Dinkes Kaltim juga telah mensosialisasikan bahaya dari dampak narkoba tersebut.

"Kami juga sosialisasi terkait bahaya dari narkoba, obat-obatan seperti ekstasi. Kami juga memusnahkan barang-barang seperti itu. Dinas Kesehatan Samarinda Kota juga memiliki peran untuk mensosialisasikan ke sekolah-sekolah dampak dari narkoba ini," pungkasnya. **(ADV/nta)**

Pewarta : Ernit

Editor : Nicha Ratnasari

Informasi Harga TBS Kelapa Sawit bagi Pekebun Bermitra



Umur Tanaman (Tahun)

Rp Harga TBS (Rp/Kg)

3	1.917,85
4	2.049,33
5	2.058,14
6	2.079,43
7	2.091,39
8	2.107,53
9	2.149,04
>10	2.174,53

Harga CPO

Rp. 10.532,27



Harga Kernel

Rp. 4.747,28

Update : Oktober Periode II (16-31 Oktober 2023)

@disbunkaltim @disbun.kaltimprov.go.id

KALTIM BERDAULAT MENUJU INDONESIA SEJAHTERA

DINAS PERKEBUNAN *Minggu Ke III*
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR *BULAN: Oktober 2023*

SIPASBUN
SISTEM INFORMASI PASAR PRODUK PERKEBUNAN UNGGULAN

KOMODITAS	PETANI/ PRODUSEN	PENGECEK/ PENGUMPUL	Indikasi Karet K3 100%
Karet	Rp.8.800 /kg K3 50-55%	Rp.12.000/kilo	Rp.21.642/kg
Lada Putih	Rp.55.000 /kg	Rp.97.000 /kg	Indikasi Karet K3 85% Rp.18.396/kg
Kelapa Tua	Rp.5.700 / hj	Rp.2.200/hj	Indikasi Karet K3 50% Rp.9.200/kg
Kelapa Muda	Rp.8.700 / hj	Rp.9.500 / hj	TBS Kelapa Sawit Penetapan Harga Provinsi Bagi Pekebun Bermitra Periode II (16 sd 30) bulan September 2023 Berdasarkan Umur Tanaman Harga TBS Umur >10 Thn Rp.2.198,63/kg turun Rp.22,6 atau 1,0% dari periode sebelumnya
Biji Kakao	Rp.28.000 / kg	Rp.32.000 / kg	
Gula Merah Aren	Rp.28.500 / kg	Rp.30.200 / kg	

HARGA RATA-RATA KOMODITI PERKEBUNAN KABUPATEN/KOTA

BerAKHLAK 

DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

INFORMASI HARGA INDIKASI KARET
Tanggal 7 November 2023

Informasi Harga Indikasi Karet Provinsi Kalimantan Timur Berbagai Tangkapan Kadar Karet Kering (K3)

Dasar Perhitungan Harga Indikasi Karet adalah Harga SICOM (Singapore Commodity) Hari ini pada Technically Specified Rubber (TSR20)/ Standard Indonesian Rubber (SIR20)

Harga SICOM hari ini: 146,8 US Cent
Kurs Rupiah Kisaran: Rp.15.692
Harga Dasar / FOB: Rp.23.035 X 85%
RP.19.580 TURUN 0.3%

KONDISI KARET

Harga Jalan Pabrikasi K3 100%	Harga /kg
HARGA KARET KERING STOK GUDANG 15 HARI LEDIH K3 70% - 75%	Rp. 13.750 - Rp. 14.750
HARGA KARET KERING STOK GUDANG K3 45% - 49%	Rp. 12.800 - Rp. 13.600
HARGA KARET KERING STOK GUDANG TINGKAT PETANI/UPPD K3 40% - 44%	Rp. 11.800 - Rp. 12.600
HARGA KARET KERING TINGKAT PETANI / UPPD K3 55% - 59%	Rp. 10.800 - Rp. 11.600
HARGA KARET KERING TINGKAT PETANI K3 50% - 54%	Rp. 9.800 - Rp. 10.600
HARGA KARET DASAH TINGKAT PETANI K3 45% - 49% PANEN 2-3 HARI	Rp. 8.800 - Rp. 9.600
HARGA KARET DASAH TINGKAT PETANI K3 40% - 44% (DARU PANEN)	Rp. 7.800 - Rp. 8.600

BerAKHLAK 



DPRD PROVINSI KALTIM



Safuad Dorong Pemerintah Siapkan Langkah Konkret Hadapi El Nino

SAMARINDA - Dampak El Nino yang mengancam dunia termasuk di Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat perhatian dari Anggota DPRD Kaltim, Safuad. Menurutnya El Nino, bisa berdampak pada beberapa sektor khususnya pertanian.

Berdasar prediksi sejumlah lembaga klimatologi dunia, El Nino akan mencapai puncaknya pada akhir tahun ini, sejak November hingga Februari tahun 2024. Meskipun Indonesia akan berkurang dampaknya bila memasuki musim hujan.

Mengingat hal tersebut, Safuad mendesak pemerintah untuk menyiapkan program alternatif yang dapat mengatasi masalah kekeringan yang dapat berimplikasi pada sektor pertanian. Musabab, bila tak diantisipasi maka penurunan produksi padi di Kaltim akan terjadi.

Politisi PDI P mengatakan, koordinasi yang dan sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, serta pusat, sangat diperlukan untuk mengantisipasi dampak El Nino yang berpotensi mengganggu ketahanan pangan.

"Sudah ada program yang telah dibuat oleh Kementerian Pertanian, seperti antisipasi dini, adaptasi, mitigasi, dan kolaborasi. Ini patut diapresiasi. Namun, program tersebut belum cukup untuk mengatasi masalah yang dihadapi," jelasnya kepada media ini.

Semisal petani di Daerah Pemilihan (Dapil) -nya Kutim, yang mengalami penurunan produksi padi hingga lima puluh persen akibat kekeringan. Dirinya menyarankan agar pemerintah menyediakan sarana prasarana yang dapat memastikan ketersediaan air untuk sawah-sawah di Kutim.

"Petani di Kutim sangat membutuhkan perangkat seperti pipa atau selang yang dapat menyalurkan air



Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Safuad

dari sumber-sumber air yang ada ke sawah mereka. Ini adalah peran pemerintah dalam membantu petani mengatasi keterbatasan mereka," ujar Legislator Dapil Bontang, Kutim, Berau ini.

Anggota DPRD yang telah dua periode duduk di kursi "Karang Paci" tersebut mengusulkan agar pemerintah membangun jaringan irigasi di beberapa wilayah yang menjadi sentral pertanian di Kutim, seperti Kaubun, Kaliorang, Long Mesangat, dan Kongbeng.

la mencontohkan, pemerintah dapat membuat sumur, bendungan, atau

mata air, kemudian menghubungkannya dengan pipa ke sawah.

"Ini adalah solusi alternatif yang dapat membantu petani menghadapi El Nino. Saya yakin, dengan koordinasi yang baik dan anggaran yang maksimal, dampak El Nino dapat diminimalisir," tuturnya.

Lebih lanjut Safuad juga mengingatkan agar pemerintah memanfaatkan dana desa untuk membantu pembangunan jaringan irigasi tersebut. **(Eky/Adv/DPRD Kaltim)**

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat memimpin paksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pejabat Kepala Daerah, Kamis (9/11/2023).

Gelar Rakor Persiapan Laporan Kinerja Pj Bupati PPU, Makmur; Mari Kerja Semaksimal Mungkin untuk Masyarakat

PPU - Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) melaksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pejabat Kepala Daerah, di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, Kamis, (9/11/2023). Giat ini dipimpin langsung oleh Pj Bupati PPU Makmur Marbun dan dihadiri Sekertaris Daerah (Sekda) PPU Tohar, Para Asisten PPU. Serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab PPU.

Dalam arahnya, Makmur meminta kepada seluruh pimpinan OPD dapat bekerja semaksimal mungkin dalam meningkatkan pelayanan publik di PPU. Pun hal ini bukan untuk semata-mata pencitraan dirinya da-

lam memimpin PPU. Namun lebih ke pada pengoptimalan pelayanan pada seluruh masyarakat PPU.

"Capaian kinerja seluruh masing-masing OPD harus mengalami peningkatan, seiring dengan ditetapkannya kabupaten Penajam paser utara sebagai wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN)," ujarnya.

Lanjutnya, kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemkab PPU diminta untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran. Untuk bersama-sama bekerja dan berinovasi untuk kemajuan PPU

"Selaku Pejabat Bupati PPU mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala OPD dan para peja-

bat," sambung Makmur.

Adapun diskusi yang dilakukan terkait laporan persiapan kinerja Makmur yang diamanahi Kemendagri untuk memimpin Pemkab PPU hingga hasil Pilkada 2024 nanti ada. Di antaranya meliputi permasalahan stunting, keberadaan Badan Usaha milik Daerah (BUMD) dalam mengurangi angka pengangguran, persoalan perizinan hingga isu-isu terkait OPD.

"Semoga apa yang didiskusikan hari ini membawa dampak baik untuk kemajuan masyarakat kabupaten Penajam paser utara yang kita cintai," tutup Makmur. (ADV/SBK)



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Pj Bupati PPU, Makmur Marbun saat menyerahkan penghargaan pada tenaga kerja konstruksi PPU berprestasi dalam kompetisi konstruksi pada acara Konstruksi Indonesia (KI) 2023, Kamis (9/11/2023).

Pemkab PPU Gelar Forum Jasa Konstruksi, Tingkatkan Jumlah Tenaga Kerja Bersertifikat

PPU - Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) menyelenggarakan Forum Jasa Konstruksi di Aula Hotel Aqila, Kamis (9/11/2023). Kegiatan ini bertujuan membahas isu-isu terkini industri konstruksi di PPU yang melibatkan masyarakat jasa konstruksi, yaitu pengguna jasa, penyedia jasa, dan unsur lainnya.

Tema dalam kegiatan kali ini ialah "Kesiapan Tenaga Kerja Konstruksi Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Mewujudkan Penajam Paser Utara Serambi Nusantara". Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat membuka kegiatan menyampaikan sertifikasi menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan.

Sertifikasi tenaga kerja konstruksi ini menjadi penting guna menjamin kualitas konstruksi yang dibangun. Pun Forum Jasa Konstruksi, sebut Makmur, seharusnya sudah harus diterapkan bertahun-tahun lalu, minimal setahun sekali.

"Melalui forum ini, kita memiliki kesempatan untuk mendengar ide, pengalaman, dan perspektif dari berbagai pihak terkait di sektor konstruksi ini. Semoga ke depan Kita bisa terus

bergandengan tangan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor jasa konstruksi di PPU," ungkapnya.

Forum ini, sambungnya, dapat menjadi wadah bagi masyarakat jasa konstruksi untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah atau lembaga. Maka itu, pihaknya berkomitmen mendukung segala sesuatu yang diperlukan agar sektor konstruksi semakin optimal.

"Kami akan terus mendorong investasi di bidang ini, dengan menyediakan akses informasi yang lebih baik. Serta memberikan dukungan dan fasilitas yang dibutuhkan bagi seluruh pelaku industri dalam mewujudkan proyek-proyek konstruksi yang berkualitas dan berdampak positif bagi perkembangan PPU," jelas Makmur.

Dalam Forum Jasa Konstruksi ini, diberikan pula penghargaan kepada Tenaga Kerja Konstruksi PPU peserta kompetisi konstruksi pada acara Konstruksi Indonesia (KI) 2023. Waras Wahyudi Juara 3 Nasional kategori Jabatan Kerja Tukang Bata, Imam Hanafi kategori Jabatan Kerja

Tukang Pasang Rangka Baja Ringan, dan Naafi'u Hayyu Nikmah kategori BIM Modelling.

Sementara, Kepala Dinas PUPR PPU Riviana Noor menuturkan akan ada penambahan Bidang Bina Konstruksi di Dinas PUPR. Sehingga dapat lebih fokus dan mempercepat kinerja penyelesaian permasalahan.

"Untuk itu, dibutuhkan dukungan dan kebijakan di dalam kegiatan percepatan sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi di PPU" katanya.

Alasannya, kini di PPU terdapat 77.5 persen tenaga kerja konstruksi yang belum tersertifikasi atau sejumlah 4.324 orang. Maka itu, langkah awal mengatasi persoalan itu ialah dengan meminta dukungan bantuan keuangan dari provinsi untuk sertifikasi tenaga terampil di PPU.

"Mari bersama-sama mencari solusi terbaik untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan dalam proyek-proyek konstruksi yang sedang dilakukan dan akan datang. Sehingga kedepannya juga bagi yang belum memiliki sertifikat bisa memilikinya," tutup Riviana. (ADV/SBK)



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat memimpin rapat koordinasi persiapan jelang Nataru 2023, Kamis (9/11/2023).

Makmur Marbun Pimpin Rakor Persiapan Awal Jelang Nataru 2023 di PPU

PPU - Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) terkait persiapan jelang peringatan Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) di lingkungan PPU, Kamis, (9/11/2023). Pertemuan ini dilakukan lebih cepat dari biasanya, untuk mengantisipasi beberapa hal, dan memastikan persiapan optimal bisa dilakukan.

Walaupun perayaan pada akhir-akhir tahun itu masih cukup jauh, Makmur telah menginstruksikan kepada seluruh Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) untuk segera mempersiapkannya. Utamanya pada OPD yang berkaitan langsung dengan pengamanan ketertiban dan keamanan wilayah.

"Penajam Paser Utara harus menjadi kabupaten yang paling siap menyambut Natal 2023 dan Tahun baru 2024 ini," katanya.

Ia menegaskan agar segala sesuatu terkait hari besar dan pergantian tahun khususnya di PPU, sudah disiapkan mulai sekarang. Karena menurutnya, jika terlambat dilakukan, dikhawatirkan ketika perayaan

semakin dekan justru akan menyulitkan pihak-pihak yang dilibatkan nantinya.

Adapun rapat koordinasi ini merupakan langkah awal dalam persiapan. Ke depannya, pihaknya bakal melakukan beberapa kali rapat lagi untuk menindaklanjuti apa yang telah disepakati hari ini.

"Saya minta segera bentuk tim untuk Nataru ini dan siapkan segala sesuatunya. Saya belum tau dimana saja titik-titik posko Nataru untuk PPU," pungkasnya. (ADV/SBK)



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Rapat persiapan dilaksanakan di ruang rapat Asisten II Setkab PPU, Kamis (9/11/2023).

Pemkab PPU Siap Gelar “Penajam Paser Utara Festival 2023” November Ini, Bakal Ada Andi RIF dan Iroel Maulana

PPU - Dalam waktu dekat, Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) bakal menggelar “Penajam Paser Utara Festival 2023”. Dalam persiapan itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab PPU, Nicko Herlambang bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) PPU menggelar rapat persiapan, Kamis (09/11/2023).

Nicko mengatakan diselenggarakannya event akbar tersebut pada tanggal 17 hingga 20 November 2023 mendatang. Bertempat di 3 tempat sekaligus.

Yakni kawasan Stadion Panglima Sentik dan gedung Graha Pemuda Kelurahan Nipah-Nipah serta di Alun-Alun Taman Pemkab PPU. Pun rencananya, dalam gelaran ini akan menampilkan artis papan atas ber-genre rock alternatif

“Pada tanggal 17 nanti itu pembukaan Expo dan pada tanggal 18 nanti pagi harinya akan ada car free day sekaligus jalan santai serta malam harinya akan ada penampilan Andi RIF dan Iroel Maulana,” terangnya.

Nicko mengharapkan nantinya pada event tersebut berjalan dengan lancar. “Makanya mulai dari sekarang harus dipersiapkan dengan matang,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pariwisata dan Pemasaran Disbudpar PPU, Juzlizar Rakhman sekaligus panitia pada event itu mengatakan melalui event ini, Pemkab PPU memberi ruang bagi para pelaku penggiat seni di PPU untuk menampilkan karya-karyanya. Bahkan bisa membuka seluas-luasnya bagi UMKM mendapatkan peluang pasar.

“Untuk dari segi event itu sendiri, ketika event ini berjalan dengan lancar tentu kondusivitas daerah bisa lebih baik,” ungkapnya.

Jul, sapaannya, juga mengharapkan dengan adanya event besar di PPU seperti ini tentu akan menumbuhkembangkan UMKM di Benuo Taka. Dengan menggelar event ini, PPU harapannya memiliki event unggulan sekaligus memberikan ruang tumbuhnya seni dan budaya, serta dukungan terhadap sektor perekonomian daerah.

“Tentu ini akan berdampak pada UMKM dan bisa lebih meningkat lagi dari segi pendapatan mereka. Dengan bertumbuhnya UMKM di PPU tentu perputaran keuangan daerah akan lebih meningkat untuk pendapatan daerah,” pungkasnya. **(ADV/SBK)**



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Pj Bupati PPU, Makmur Marbun saat membuka kegiatan Pendampingan dan Penghargaan MCP 2023.

Pendampingan dan Penghargaan MCP 2023, ASN PPU Diminta Tingkatkan Kualitas

PPU - Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun membuka acara Pendampingan dan Penghargaan Monitoring Center of Prevention (MCP) 2023 pada Area Intervensi Manajemen ASN Pemkab PPU. Kegiatan yang digelar ini dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI Kamis, (09/11/2023).

Makmur menjelaskan kegiatan ini memiliki signifikansi yang penting bagi roda pemerintahan Pemkab PPU. Mengingat peningkatan kualitas dan kinerja ASN Pemkab PPU sangat krusial saat ini.

"Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Inspektorat Jenderal Kemendagri Republik Indonesia. Yang dengan cepat memberikan respons positif terkait permohonan Kami untuk memberi-

kan pendampingan dan pengarahan untuk ASN PPU," ujarnya.

Selain itu, ke depannya juga akan ada keterlibatan lembaga lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menilai capaian MCP. Hal ini juga merupakan sebuah langkah maju yang patut dilakukan.

Sebagai langkah dalam memastikan bahwa arah gerak dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi telah dilakukan. Untuk itu, kegiatan MCP dan penilaian yang dilakukan oleh KPK juga merupakan sebuah cerminan objektif. Terhadap kinerja dan integritas ASN di PPU.

"Saya juga menyadari bahwa ASN adalah tulang punggung dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks ini, Saya mengajak seluruh jajaran ASN untuk meman-

dang acara ini sebagai kesempatan untuk mengintrospeksi diri, memperkaya pengetahuan, dan mengasah keterampilan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," terang Makmur.

Lebh lanjut, ia juga mengajak kepada semua yang hadir untuk fokus membangun sinergi dan meningkatkan kompetensi. Serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kualitas manajemen ASN di lingkungan Pemkab PPU.

"Mari Kita bersama-sama berkomitmen untuk mengubah tantangan menjadi peluang, meningkatkan capaian dalam manajemen ASN, dan menjadikan Pemkab PPU sebagai contoh yang baik dalam pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berintegritas." tutupnya. (ADV/SBK)



DISKOMINFO PPU FOR MEDIAKALTIMGROUP

Pj Bupati PPU, Makmur Marbun saat menyerahkan Surat Keputusan (SK) Plh Kepala DPMD PPU pada Kepala Bagian Pemerintahan Setkab PPU, Muchtar, Kamis (9/11/2023).

Tunjuk Plh Kepala DPMD PPU, Makmur Beri Mandat Pengawasan Proses Lanjutan Pilkades Serentak 2023

PPU - Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun menunjuk Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Setkab PPU, Muchtar menjadi pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) PPU. Ia juga diminta untuk menjalankan tugas rutin sementara kedinasan, dan secara khusus untuk mengawal proses lanjutan proses Pilkades Serentak 2023.

Mandat itu diberikan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) di penghujung kegiatan rapat koordinasi (rakor) Persiapan Laporan Kinerja Pj Bupati PPU, Kamis (9/11/2023). Muchtar ditunjuk menggantikan sementara setelah terjadi kekosongan jabatan pasca Kepala DPMD PPU, Pang Irawan yang cuti.

Makmur mengatakan tugas-tugas yang ada di DPMD PPU saat ini sangat penting dan tidak bisa untuk ditinggalkan. Khususnya ialah

pekerjaan untuk mengevaluasi proses Pilkades Serentak PPU.

"Pelaksana Harian diminta untuk melanjutkan dan mengawal proses terkait pemilihan kepala desa serentak di kabupaten Penajam Paser Utara," katanya.

Sebab, menurutnya Proses Pilkades ini telah menghadirkan dinamika menarik yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Untuk memastikan bahwa sistem demokrasi di tingkat desa berjalan dengan baik, transparan, dan adil.

Seperti diketahui, Pemkab PPU telah melaksanakan pemilihan Pilkades Serentak di 14 desa pada 29 Oktober lalu. Ada beberapa hal yang menjadi evaluasi usai pelaksanaan pesta demokrasi di tingkatan pemerintahan terbawah untuk difokuskan.

Yakni mulai dari minimnya partisipasi pemilih dari 14 desa tersebut. Yaitu hanya mencapai 73 persen

dari total pemilih yang terdaftar sebanyak 30.162 orang.

Kemudian juga terkait adanya fenomena terpilihnya kepala desa baru tanpa petahana dari 11 calon kepala desa (cakades) petahana yang bertarung dalam pilkades. Hal ini dinilai akan menjadi perhatian tersendiri bagi masyarakat dan pemangku kebijakan di daerah tersebut atas kinerjanya selama ini.

Lebih lanjut, beberapa hal itu lah yang diminta Makmur untuk dapat dikawal sebaik-baiknya. Adapun tugas Plh ini diberikan, sesuai aturan masa tugas paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang hingga 6 bulan.

"Saat ini proses Pilkades Serentak sudah masuk pada matrik jadwal penyerahan laporan akhir, dari BPD ke Bupati PPU melalui masing-masing camat. Seluruh kades terpilih akan dilantik pada 11 Januari 2024," pungkasnya. (ADV/SBK)



Komisi II DPRD PPU Minta Pemkab Susun Strategi Atasi Wilayah Rentan Pangan

PPU - Ketua Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Wakidi meminta Pemkab PPU dapat segera memberikan perhatian terhadap sektor ketahanan pangan daerah. Mendorong adanya kebijakan proaktif untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga pangan.

Diketahui saat ini, sebanyak 20 desa/kelurahan di wilayah PPU masuk dalam klasifikasi rentan pangan. Ia mengungkapkan urgensi empat pilar ketahanan pangan sebagai pondasi untuk menghindari wilayah dari kerentanan pangan perlu difokuskan.

"Pemerintah harus bertindak cepat untuk memastikan persoalan pangan ini, tidak hanya tersedia dalam jumlah yang cukup, tetapi juga berkualitas," ujarnya Kamis (9/11/2023).

Sekadar informasi, empat pilar ketahanan pangan yang diidentifikasi mencakup ketersediaan pangan yang cukup, aksesibilitas, pemanfaatan berdasarkan gizi. Kemudian stabilitas dalam ketersediaan pangan.

Strategi ini diharapkan dapat membebaskan daerah dari ancaman kerentanan pangan yang saat ini tengah dihadapi. Selain itu, Wakidi juga menekankan pentingnya edukasi gizi bagi masyarakat.

"Soal itu, pemerintah harus berper-



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Ketua Komisi II DPRD PPU, Wakidi saat diwawancarai.

an aktif dalam memberikan pengetahuan gizi dasar kepada masyarakat, sehingga mampu memanfaatkan pangan yang tersedia dengan tepat," jelasnya.

Namun demikian, masalah wilayah yang masih rentan pangan ini bukan hanya tanggung jawab dinas terkait, yakni Dinas Ketahanan Pangan (DKP) PPU. Namun lebih pada

membutuhkan kerjasama dan sinergitas lintas instansi.

Kerjasama lintas sektor diharapkan dapat memberikan solusi komprehensif dan berkelanjutan terhadap permasalahan pangan di PPU. "Masyarakat juga harus mampu diberikan edukasi dan memastikan konsumsi pangan yang bernilai gizi," tutup Wakidi. (ADV/SBK)





SAMARINDA

GASTRONOMY PACKAGE



Nikmati penawaran spesial menginap di ibis Samarinda sambil menikmati hidangan lezat di restoran. Hanya dengan tambahan mulai dari Rp 18 ribu, Anda akan mendapatkan fasilitas sarapan dan kredit voucher F&B sebesar Rp 75 ribu di restoran kami.

Dapatkan diskon 5% untuk anggota ALL serta tambahan 10% untuk anggota Accor Plus.

Berlaku hingga 30 Desember 2023

SCAN BARCODE
UNTUK MELIHAT RATE



Informasi selengkapnya hubungi:



@ibishotelsamarinda



0811 - 551 - 6000

all.accor.com



Anggota Komisi I DPRD Berau, Faletinus Keo Meo.

Seiring Meningkatnya APBD, Dorong Peningkatan Sektor Pendidikan

TANJUNG REDEB - APBD Berau pada tahun 2024 mendatang menyentuh Rp 4,7 triliun. Maka dari itu, peningkatan sektor pendidikan diharapkan Anggota Komisi I DPRD Berau, Faletinus Keo Meo.

Dijelaskan Faletinus, anggaran 20 persen sudah terbagi dan Dinas Pendidikan hanya menerima 13 persen. Sedangkan untuk pembangunan hanya dianggarkan 0,8 persen. Jumlah ini membuat beberapa sekolah harus gigit jari, karena usulan mereka untuk menambah ruang kelas jadi

terhambat.

"Saya rasa 30 persen atau 40 persen tidak masalah," imbuhnya.

Politikus Demokrat ini menambahkan, ada tiga masalah terbesar yang saat ini dihadapi dunia pendidikan Indonesia. "Yakni operasional sekolah, keterbatasan guru, dan kesejahteraan guru. Padahal semua itu saling keterkaitan," katanya.

Menurutnya, permasalahan di sektor pendidikan hampir ada di seluruh daerah. Sebab, sektor ini sangat kompleks dan komprehensif.

"Mulai dari anggaran pendidikan, ketersediaan tenaga pendidik, peningkatan kualitas sumber daya pendidik, sarana prasarana, hingga infrastruktur pendidikan," paparnya.

Faletinus berharap pemerintah bisa mengatasi persoalan yang terjadi di dunia pendidikan tersebut. "Dengan keterbatasan dari pemerintah, untuk memenuhi itu semua diperlukan koordinasi baik, dengan penyelenggara pendidikan itu sendiri," pungkasnya. **(adv/dez)**

Jelang Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah, Dorong Realisasi Ketahanan Pangan



Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong

TANJUNG REDEB - Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong mendorong realisasi soal ketahanan pangan, menjelang masa jabatan kepala daerah.

Dia mengungkapkan, ada beberapa poin yang menjadi perhatian, yakni meningkatkan ketahanan masyarakat, menjamin infrastruktur dan tata ruang yang ramah lingkungan serta perekonomian peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

"Harus Komitmen untuk meningkatkan kinerja integritas dan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat," ungkapnya.

Ditegaskannya, kebijakan merupakan tanggung jawab kewajiban masing-masing OPD. Jangan hanya pandai melaporkan, namun tidak ada pernah ke lapangan, untuk melihat hasilnya secara langsung.

"Pada kesempatan ini juga kami meminta perhatian khusus kepada pertanian, perkebunan dan perikanan untuk lebih ditingkatkan," tuturnya.

Dirinya mengapresiasi pemerintah daerah, atas tercapainya universal jaminan kesehatan gratis untuk masyarakat Kabupaten Berau. "Semua yang telah kami sampaikan dalam poin-poin di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan," bebernya.

Politikus Gerindra ini berharap, apa yang telah diputuskan dan akan kerjakan sudah sesuai dengan tanggung jawab harapan masyarakat Berau. "Untuk janji politik bupati, saya harap segera terealisasi. Jangan buat masyarakat menunggu," tutup Peri. (adv/dez)

Dorong Lakukan Studi, Terkait Pemasangan Sensor Jembatan

TANJUNG REDEB - Keselamatan masyarakat saat berkendara menjadi perhatian utama. Terlebih ketika melintasi jembatan. Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga mengungkapkan, untuk mengetahui kondisi jembatan secara berkala, diperlukan pemasangan sensor jembatan bernama Structural Health Monitoring System (SHMS).

"Pemkab Kukar sudah memasang sensor tersebut di Jembatan Kutai Kartanegara. Saya harap dalam hal ini Dinas Perhubungan dapat melakukan studi ke sana," ungkapnya.

Menurutnya, meski Jembatan Sambaliung diperbaiki baru-baru ini, namun usianya sudah tua. Sedangkan Jembatan Gunung Tabur, sisi ketahanan jembatan kerap kali mengalami hantaman oleh lalu lintas di atas sungai.

"Karena ini kan rawan. Pernah tersenggol juga, umur juga berjalan sudah tua," jelasnya.

Saga mengharapkan sensor itu bisa terpasang pada kedua jembatan yang ada, yakni Jembatan Sambaliung dan Jembatan Gunung Tabur, sehingga pemerintah bisa memantau secara berkala terkait kondisi jembatan tersebut.

"Ya kita minta Dishub Berau bisa untuk studi ke sana (Kukar, red) sehingga bisa merapkan itu, saya rasa anggarnya tidak besar," paparnya.

Meski kewenangan berada di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, hal ini diharapkan tetap bisa diperjuangkan. Sebab, hal itu menyangkut keselamatan dan kenyamanan masyarakat Berau saat melintasi dua jembatan tersebut.

"Walaupun kewenangannya di provinsi, mungkin juga Dishub ini kita dorong supaya bisa koordinasi," pungkasnya. (adv/dez)



Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga

APBD Berau Tahun 2024 Cukup Besar, Harap Puskesmas di Perkampungan Diperhatikan



Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong

TANJUNG REDEB - Persoalan terkait kurang maksimalnya pelayanan Puskesmas yang berada di wilayah perkampungan disorot Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong.

Menurutnya, dengan APBD Berau tahun 2024 yang cukup besar, Puskesmas di pedalaman harus diberi perhatian lebih. Mengingat, jarak mereka cukup jauh dari pusat kesehatan yang ada di kota.

"Ini menjadi tugas berat bagi Dinas Kesehatan. Harus seimbang, antara bangunan Puskesmas dengan pelayanannya," ungkapnya.

Ketersediaan obat di fasilitas kesehatan, khususnya daerah perkebunan kerap didapati sudah habis sebelum waktunya. Dinilai Rudi, penyebabnya yakni banyaknya perusahaan tidak memfasilitasi pekerjanya dengan klinik mandiri.

"Stok mereka pastinya akan cepat habis. Seharusnya perusahaan itu punya klinik mandiri," tegasnya.

Kendati demikian, dengan permasalahan yang ada mestinya pihak OPD bisa mengambil langkah antisipasi guna menstabilkan antara ketersediaan obat danarganya.

"Perusahaan punya tanggung jawab. OPD juga mesti gesit dalam mengantisipasi keluhan masyarakat. Juga dalam memaksimalkan layanan Puskesmas," pungkasnya. (adv/dez)

Minta Perusahaan Manfaatkan Kapabilitas Pekerja Disabilitas

TANJUNG REDEB - Adanya dugaan diskriminasi pekerja disabilitas menjadi sorotan Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah.

Diketahui, ada beberapa perusahaan mengklaim telah mengakomodir tenaga kerja disabilitas, tapi kenyataannya para penderita disabilitas tersebut masih dipandang sebelah mata.

Syarifatul mengimbau perusahaan di Kabupaten Berau untuk dapat menempatkan pencari kerja tersebut sesuai kapasitas dan kemampuannya masing-masing. "Perusahaan juga harus bisa menempatkan mereka. Namanya disabilitas, tentu punya kekurangan," katanya.

Ia meminta setiap perusahaan di Kabupaten Berau bisa memanfaatkan kapabilitas para pekerja disabilitas tersebut, secara khusus untuk diberdayakan. "Jangan juga diberikan hal yang kira-kira tidak bisa dilakukan. Pada dasarnya mereka (Pekerja disabilitas, Red) punya hak yang sama," tuturnya.

Kendati demikian, Politikus Golkar ini berharap peran aktif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk memberikan fasilitas sebagai jembatan antara pencari kerja dan perusahaan. "Tidak lepas dari pengawasan pemerintah daerah. Tentunya agar tidak terjadi diskriminasi lagi nantinya," pungkasnya. (adv/dez)



Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah



RAFI'/MEDIA KALTIM

Jembatan Kartanegara.

Upaya Deteksi Dini, Pemkab Kukar Pasang Sensor Jembatan Senilai Rp 8,5 M

TENGGARONG - Sistem keamanan segera dipasang pada Jembatan Kartanegara. Berupa sistem sensor yang berfungsi mengetahui kondisi jembatan secara periodik. Yakni berupa alat Structure Health Monitoring System (SHMS). Rencananya, akan dipasang sebelum akhir tahun 2023 ini.

Saat dijumpai di ruangnya, Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kutai Kartanegara (Kukar), Linda Juniarti, alat SHMS dipasang dengan pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kukar 2023. Senilai Rp 8,5 miliar, nilai tersebut sudah termasuk biaya perawatan Jembatan Kartanegara secara keseluruhan.

Banyak kemudahan yang diklaim oleh Linda, dengan terpasangnya alat tersebut. Yakni Pemkab Kukar tidak perlu lagi melakukan uji statis dan uji dinamis pada jembatan yang menghubungkan Kecamatan Tenggarong-Tenggarong Seberang. Karena secara periodik, jembatan sepanjang

270 meter akan tercatat secara sistem manajemen elektronik.

"Selain itu, jika SHMS terpasang, maka kondisi jembatan akan tercatat secara periodik," jelas Linda.

Fungsi lainnya, gangguan atau kelainan pada struktur jembatan akan terdeteksi sedini mungkin. Alat tersebut mampu mendata perilaku struktur dan menganalisa, apakah perlu atau tidaknya memperbaiki infrastruktur jembatan dalam periode waktu tertentu.

Secara teknis, SHMS mampu mengukur getaran yang terjadi pada jembatan. Selanjutnya, memonitor distribusi tegangan infrastruktur jembatan saat menerima beban dan memantau pengaruh lingkungan sekitar terhadap infrastruktur.

Data yang termonitor, didapat dari sensor yang diletakkan di beberapa titik. Selanjutnya akan disajikan dan diproses oleh instrumen TMR Interface Module. "Data SHMS akan ditampilkan secara langsung di layar komputer milik dinas," lanjutnya.

Perawatan lainnya, berupa rehabilitasi badan jembatan. Yakni perbaikan badan jalan dengan melapis ulang aspal jalan. Termasuk memperbaiki drainase jembatan, agar meminimalisir genangan air di badan jalan di atas jembatan. "Perbaikan tersebut kita target akan rampung pada akhir tahun ini," akhiri Linda.

Sementara itu, Indra, salah satu warga Tenggarong yang kerap menggunakan Jembatan Kartanegara pun menyambut baik adanya pemasangan alat SHMS. Hal ini tentunya menambah rasa aman bagi pengguna jembatan.

Tak hanya itu, sedini mungkin potensi kerusakan pada jembatan bisa termonitor dengan baik. "Alhamdulillah, langkah yang tepat dilakukan oleh Pemkab Kukar untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang menggunakan jembatan ini," tutup Indra. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i



RAFI'I/MEDIA KALTIM

Kantor Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Marangkayu.

Keberadaan Kantor PATEN, Mudahkan Pelayanan Administrasi Masyarakat Marangkayu

TENGGARONG - Kemudahan pelayanan satu pintu, dikembangkan oleh Kecamatan Marangkayu, Kutai Kartanegara (Kukar). Terutama untuk kebutuhan berkas-berkas administrasi, yang menjadi kebutuhan masyarakat. Yakni dengan menyiapkan Kantor Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN), di kawasan perkantoran Kecamatan Marangkayu.

Sebanyak 11 layanan yang disiapkan di layanan Kantor PATEN. Mulai dari pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektrik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Surat Pindah Datang, Surat Pindah Keluar, Kartu Kuning (AK-1), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Ahli Waris, Legalisir KK/KTP/AK-1, Surat Rekomendasi, SKTM (Pendidikan) dan Dispensasi Nikah.

"Itu salah satu tempat bagi masyarakat yang berurusan (administrasi) tidak perlu kemana-mana cukup tunggu di PATEN," ungkap Camat Marangkayu, Ambo Dalle.

Dijelaskan Ambo Dalle, Kantor PATEN sama halnya seperti Mall Pelayanan Publik (MPP). Isinya mulai dari staf pemerintahan hingga staf pembangunan. Masyarakat hanya perlu menyerahkan dokumen persyaratan, menunggu dan melakukan tanda tangan serah terima berkas.

Diakui Ambo Dalle, program atau inovasi Kantor PATEN sudah berjalan lama. Namun baru dilakukan perbaikan dan penataan. Hanya dengan satu lokasi, baik itu penyerahan persyaratan hingga selesai berkas, masyarakat hanya berada di satu tempat saja.

Sekarang ditata dengan kabupaten mulai bagus sudah penataannya jadi masyarakat tak perlu kesana sini, cukup duduk dan memenuhi perlengkapan dan persyaratannya setelah itu akan jadi suratnya.

"Jadi memudahkan masyarakat,

terus berbenah agar pelayanan masyarakat lebih mudah dan nyaman," tutup Ambo Dalle.

Sementara salah satu warga Kecamatan Marangkayu, Alfi, dengan adanya Kantor PATEN cukup memudahkannya dalam hal mengurus administrasi. Dari satu lokasi, ia langsung bisa mengurus beberapa kebutuhan surat-menyurat administrasi. "Lokasinya juga nyaman, kita mengurus administrasi juga tidak perlu kemana-mana lagi," pungkas Alfi. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i





COOL NOVEMBER

Deluxe Room Only

Rp 488rb

nett/night

GRATIS WELCOME VOUCHER

Breakfast

2 pax



FREE

Laundry

Up To 2 pcs



FREE

Kopi Inspirasi

Buy 3, Pay 2



FREE

Afternoon Tea



FREE

Ice Cream



→ BOOK NOW

0811 581 3669

www.hotelgrandkartika.com



Asdar Ibrahim, selaku Kepala Dinas DPMPTSP Kota Bontang.

DPMPTSP Siap Benahi Sarpas di MPP Pasar Taman Rawa Indah

BONTANG - Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang terdapat di Mall Pelayanan Publik (MPP) Pasar Taman Rawa Indah sejauh ini masih sangat banyak para warga Bontang yang mengurus surat perizinan untuk usaha.

Pada tahun ini, terdapat sekitar dari 1.700 para warga Bontang yang mengurus surat untuk perizinan. Terutama, di MPP yang mendominasi adalah warga dari Bontang Selatan. Sedangkan untuk kantor pusat, mendominasi wilayah Bontang Utara dan Bontang Barat.

Kepala Dinas DPMPTSP Bontang, Asdar Ibrahim, mengatakan untuk kantor pusat maupun kantor yang berada di MPP sejauh ini sama-sama berjalan seperti biasanya, lancar seperti biasanya dan tanpa ada kendala apapun.

"Kantor pusat maupun di MPP sama saja, akan tetapi kalau di kantor pusat kami ada pelayanan sampai malam, yang di mana hanya seminggu dua kali," ucapnya saat diwawancarai, Rabu (8/11/2023) kemarin.

Asdar juga menjelaskan kantor pusat dan kantor di MPP sangat jauh berbeda dari segi sarana dan prasarana. Akan tetapi, hal itu tidak menyurutkan warga Bontang, mereka tetap mengurus surat perizinan tanpa ada kendala apapun sejauh ini.

"Pastinya untuk Sarpras memang tugas kami. Di sana sama di sini sangat jauh berbeda. Kami sangat paham dan akui kekurangan itu. Untuk itu, kami berusaha sebaik mungkin agar tetap memberikan pelayanan yang terbaik, dan secara bertahap, walaupun di sana dengan suasana yang panas," paparnya.

Saat ini, untuk di MPP sendiri yang

masih sangat sering dikunjungi oleh masyarakat yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan DPMPTSP, untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya agar tetap bertahan terkait kekurangan Sarpras yang ada di MPP. Berharap dengan nantinya lift sudah selesai pengerjaan, maka masyarakat lebih banyak datang untuk berkunjung, dari berbelanja hingga mengurus keperluan di MPP.

"Dengan harapannya, kami sangat terbuka untuk masyarakat siapa saja, bagi yang tidak tahu dan tidak mengerti diharapkan bisa untuk datang ke kantor pusat maupun di MPP, kami siap membantu.," tutupnya. (dwi/adv)

Pewarta : Dwi
Editor : Nicha Ratnasari



Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, Kadir Tappa: Anggota DPRD Harus Rutin Gelar Sosialisasi

BONTANG - Anggota DPRD Provinsi Kaltim, Abdul Kadir Tappa, menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Wawasan Kebangsaan ke-5 di wilayah VI Kota Bontang, di Hotel Andika.

Kegiatan ini juga melibatkan narasumber dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta dosen dari Perguruan Tinggi, Turnajaya, Kamis, (9/11/2023). Abdul Kadir Tappa mengemukakan pentingnya sosialisasi kebangsaan dalam memperkuat identitas nasional serta meningkatkan semangat kebersamaan.

Wawasan kebangsaan merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia dan menjiwai karakter politik bangsa. "Menurut saya, setiap anggota DPRD harus wajib mengadakan sosialisasi secara berkala, setiap bulan atau setidaknya tiga bulan sekali, sebagai bentuk penguatan prinsip-prinsip negara kita. Tanpa prinsip yang kuat, kita tidak akan berhasil," ujar Abdul Kadir Tappa saat sosialisasi.

Bangsa Indonesia yang dikenal pluralistik, terdiri dari beragam suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah,

dan agama, menyebar dari Sabang sampai Merauke.

Kepala Badan Kesbangpol Bontang, Sigit Alfian, mengungkapkan bahwa sosialisasi mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang nilai-nilai luhur Pancasila.

"Kegiatan ini bertujuan untuk memotivasi kembali rasa cinta tanah air dan kebanggaan terhadap bangsa serta negara, serta mengajak untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," terang Sigit Alfian.

Sosialisasi ini juga diharapkan mampu membentuk tokoh-tokoh yang dapat bertindak sebagai jaring pengaman sosial dalam menyebarkan pemahaman tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, khususnya di tengah pengaruh globalisasi yang kuat terhadap generasi muda.

"Maka dari itu, saya berharap pilar-pilar kebangsaan ini dapat tumbuh dan berkembang kembali di

kalangan generasi muda, sehingga memperkuat rasa kebangsaan dan cinta tanah air," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bilher Hutahaen, advokat sekaligus dosen di Fakultas Hukum Universitas Turnajaya Bontang, menegaskan bahwa empat pilar kebangsaan merupakan elemen kunci dalam menjaga kesinambungan NKRI, seiring dengan berbagai tantangan yang dihadapi bangsa.

"Empat pilar kebangsaan harus ditanamkan dalam diri setiap individu, baik dalam pemikiran maupun tindakan, agar kita semua dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara," papar Bilher.

Bilher juga menambahkan pentingnya sosialisasi empat pilar kebangsaan ini untuk mencegah munculnya paham-paham yang dapat mengancam ideologi negara, terutama di kalangan generasi penerus bangsa. (dwi/adv)



Presiden Jokowi Resmikan PLTS Terapung Cirata 192 MWp, Terbesar di Asia Tenggara

PURWAKARTA – Presiden Joko Widodo meresmikan operasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata berkapasitas 192 megawatt peak (MWp) yang berlokasi di Purwakarta, Jawa Barat pada Kamis (9/11). Beroperasinya pembangkit ramah lingkungan ini menjadi bukti komitmen Indonesia dalam melakukan transisi energi demi mencapai Net Zero Emissions (NZE) tahun 2060.

“Hari ini merupakan hari yang bersejarah karena mimpi besar kita untuk membangun pembangkit energi baru terbarukan dalam skala besar akhirnya bisa terlaksana. Indonesia berhasil membangun PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara dan nomor 3 di dunia,” ujar Presiden.

Presiden mengatakan saat ini pertumbuhan pembangkit energi bersih di Indonesia semakin baik. Di Jawa Barat sudah memiliki PLTA dengan kapasitas hingga 1.000 MW. Dengan beroperasinya PLTS Terapung Cirata 192 MWp semakin menambah kapasitas terpasang pembangkit energi bersih.

“Ke depan, kalau dimaksimalkan

bisa menambah kurang lebih 1.000 Megawatt peak. Saya gembira dan bangga melihat PLTS Terapung di Cirata ini telah selesai, ini hasil kerja sama Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, bersama PLN dan kolaborasi dengan kekuatan dunia yaitu Masdar dari Uni Emirat Arab (UEA),” tegas Presiden.

Menteri Perdagangan Luar Negeri UEA Thani bin Ahmed Al Zeyoudi mengatakan peresmian PLTS Terapung Cirata merupakan hasil konkret kerja sama antara Indonesia dan UEA. Dengan beroperasinya PLTS Terapung Cirata menegaskan komitmen Indonesia dan UEA dalam transisi energi. Selain itu, dengan beroperasinya PLTS Terapung Cirata juga mampu membuka potensi pengembangan energi hijau lainnya di Indonesia.

“Ini juga menjadi visi penting bagi UEA, kami berkomitmen untuk terus mengembangkan teknologi ramah lingkungan. PLTS Terapung Cirata menjadi bukti kuatnya kerja sama ekonomi dan hubungan bilateral Indonesia dan UEA,” tegas Thani bin Ahmed Al Zeyoudi.

PLTS Terapung Cirata juga sebagai bentuk terciptanya kerja sama investasi yang baik antar dua negara. Proyek energi bersih ini menjadi trobosan bagi pendorong ekonomi baru di sektor logistik, pariwisata, manufaktur bahkan sektor pertanian dan ekonomi halal antar dua negara.

“Tentu saja, ke depan kita semua akan lebih banyak menghasilkan proyek energi ramah lingkungan seperti yang kita rayakan pada hari ini. Langkah strategis ini menjadi peran utama dalam mendorong target NZE,” tegas Thani bin Ahmed Al Zeyoudi.

UEA juga berkomitmen untuk melakukan investasi lanjutan khususnya di energi bersih. Dukungan UEA ini sebagai dorongan terhadap Indonesia untuk bisa mencapai NZE pada 2060 mendatang.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, pembangunan PLTS Cirata menjadi langkah nyata PLN dalam mendukung pemerintah melakukan transisi energi.

“Peresmian ini menjadi bukti bahwa transisi energi tidak hanya sekadar wacana, tetapi telah menjadi

wujud nyata bahwa PLN serius dan all out menjalankan arahan Bapak Presiden Joko Widodo dalam menghadirkan energi bersih di Indonesia," ucap Darmawan.

Proyek strategis nasional (PSN) ini memanfaatkan 4 persen area Waduk Cirata atau sekitar 200 hektare. Terdiri dari 13 pulau yang berisi 340 ribu solar panel, mampu melistriki lebih dari 50 ribu rumah. PLTS Terapung Cirata mampu memproduksi energi bersih sebesar 245 gigawatt hour (GWh) per tahun dan mereduksi 214 ribu ton CO2 per tahun.

Darmawan menjelaskan, PLTS Terapung Cirata juga menjadi bukti kolaborasi Indonesia dengan dunia global dalam melakukan transisi energi. PLTS ini dibangun hasil kolaborasi subholding PLN Nusantara Power dengan perusahaan pengembangan EBT asal UEA, Masdar.

"Pemanasan suhu bumi ini adalah masalah global, untuk itu penyelesaiannya pun harus dilakukan secara global. Pembangkit ini menjadi bukti

bahwa dalam melakukan transisi energi PLN tidak dapat melakukannya dalam suasana kesendirian, kami terbuka untuk berkolaborasi," tambah Darmawan.

Lewat kolaborasi, proyek ini mampu menyerap sekitar 1.400 tenaga kerja lokal dan memberdayakan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

"Kami melakukan joint study, joint investment, dan kolaborasi teknologi dengan state of the art of technology, sampai kolaborasi SDMnya. Dengan demikian, PLTS ini tidak hanya menambah bauran EBT, namun juga meningkatkan kapasitas nasional," kata Darmawan.

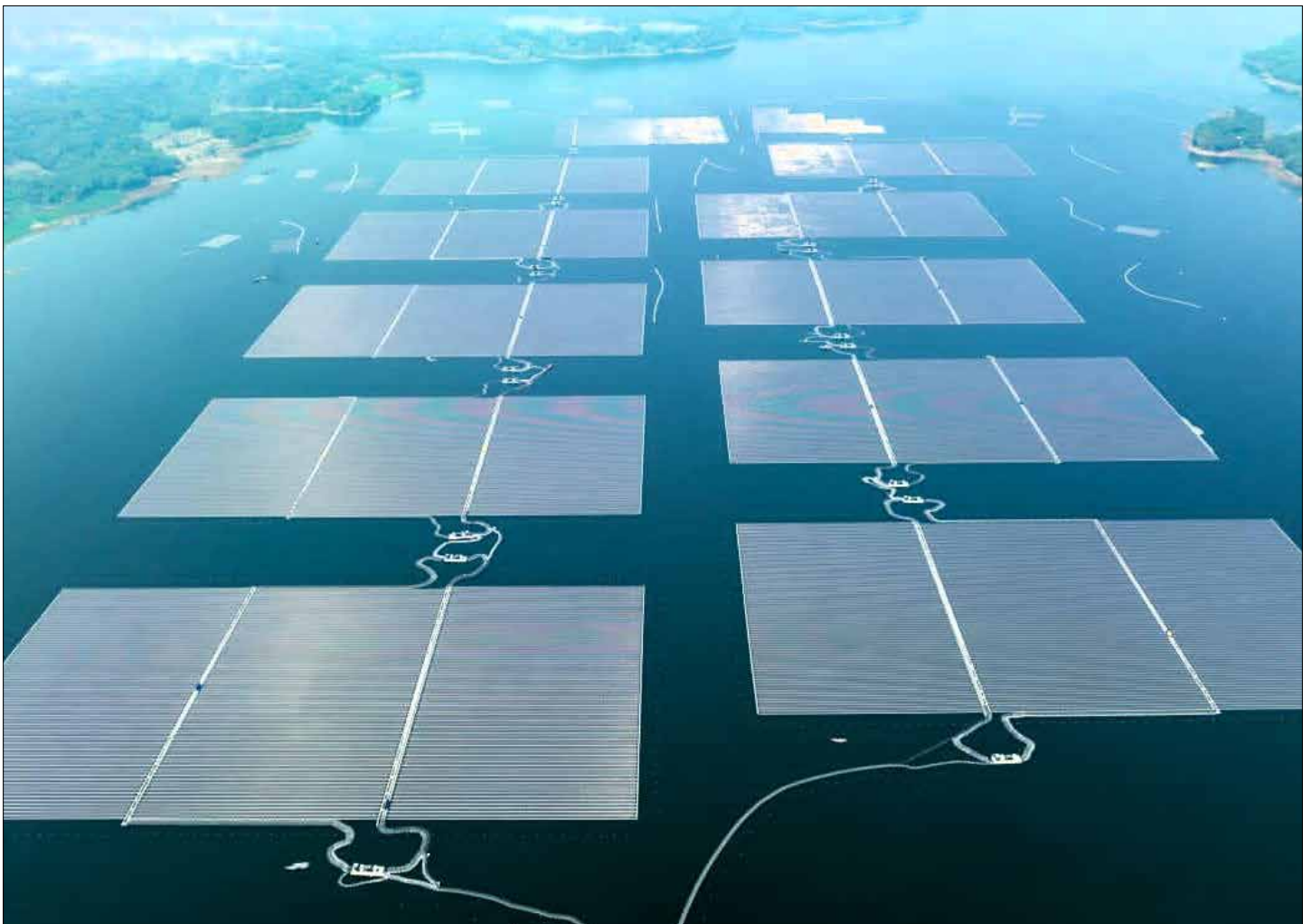
Darmawan menambahkan, melihat luasan Waduk Cirata, pihaknya telah memetakan potensi pengembangan PLTS Terapung Cirata. Dengan luasan 6.200 hektare, PLTS ini bisa dikembangkan hingga lebih dari 1.000 MWp.

CEO Masdar, Mohamed Jameel Al Ramahi menjelaskan Masdar se-

bagai perusahaan kelas dunia berkomitmen untuk terus melakukan pengembangan teknologi sehingga dapat memberikan solusi dan jawaban dalam upaya transisi energi. Ke depan, terdapat rencana pengembangan PLTS Terapung Cirata ini lebih baik lagi dan mampu memberikan kontribusi lebih kepada Indonesia.

"Kerja sama antara Masdar dan PLN menjadi bukti dukungan kami terhadap agenda transisi energi di Indonesia. Masdar dan PLN juga sepakat untuk dapat melipatgandakan kapasitas yang ada pada proyek ini. Kami sangat menantikan kolaborasi lanjutan untuk bisa memberikan manfaat yang lebih besar," tutup Jameel Al Ramahi.

Turut hadir dalam peresmian PLTS Terapung Cirata, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, dan Pj Bupati Purwakarta Benni Irwan. (ADV)





YAHYA YABO/MEDIA KALTIM

dr Dewi Maharni, M.Sc, Sp.KJ, dokter spesialis kejiwaan RSUD Taman Husada Bontang.

Dokter Spesialis Kejiwaan RSUD Bontang: Jangan Takut Berobat ke Klinik Psikiatri

BONTANG – RSUD Taman Husada Bontang memiliki klinik Psikiatri atau kejiwaan untuk melayani pasien dengan keluhan kesehatan kejiwaan atau mental. Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa RSUD Taman Husada Bontang, dr Dewi Maharni, M.Sc, Sp.KJ menjelaskan bahwa klinik psikiatri merupakan klinik untuk melayani konsultasi dan pengobatan dalam permasalahan kesehatan mental atau kesehatan jiwa.

Dalam proses alur pelayanannya, dr Dewi mengatakan sama seperti klinik lainnya dalam proses pendaftaran, ke poli klinik hingga pengambilan obat.

“Klinik psikiatri sendiri melayani semua gangguan mental baik gangguan ringan, sedang hingga gangguan jiwa berat,” kata dr Dewi Maharni, M.Sc, Sp.KJ, saat ditemui MediaKaltim.com, Kamis (9/11/2023).

Selanjutnya, dr Dewi mengatakan pada umumnya, pasien yang datang yakni pasien umum, pasien asuransi maupun pasien BPJS Kesehatan

yang memerlukan bantuan konsultasi dan pengobatan masalah mental atau kejiwaan.

“Masih banyak stigma di luar sana yang menganggap apabila berobat ke dokter jiwa dianggap ‘gila’. Banyak sih yang mengalami gangguan jiwa ringan seperti gangguan tidur dan kecemasan, yang masih menolak untuk diperiksa,” ungkapnya.

Selain itu, dr Dewi mengatakan beberapa gangguan jiwa ringan, sedang dan berat memiliki beberapa gejala dan permasalahan masing-masing yang dapat mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari.

“Gejalanya ada berbagai macam dalam mengganggu kehidupan sehari-hari yang juga bisa berdampak pada kondisi kesehatan fisik. Pada gangguan jiwa berat seseorang bahkan sampai tidak bisa membedakan antara kenyataan dan imajinasinya. Bahkan juga mengalami halusinasi dan ilusi. Sehingga fungsi peran seseorang dalam kehidupan sehari-harinya menurun atau tidak

berfungsi seperti sebelum mengalami gangguan,” jelasnya.

Dr Dewi pun mengatakan pasien yang datang berobat di klinik psikiatri ada yang diterapi dengan obat-obatan dan ada juga dilakukan psikoterapi. Pasien yang datang pun berasal dari pasien umum, pasien asuransi dan BPJS Kesehatan yang bisa melayani 15 sampai 20 pasien setiap hari.

“Psikoterapi juga dilakukan pada pasien-pasien gangguan jiwa,” ungkapnya.

Klinik psikiatri juga diharapkan dapat menjadi pelayanan kejiwaan yang baik dengan memberikan pelayanan kepada semua lapisan masyarakat. “Harapannya masyarakat jangan lagi terstigma sehingga takut dan malu untuk berobat di klinik psikiatri atau kejiwaan,” imbuhnya. (adv/yah)

Penulis: Yahya Yabo
Editor: Nicha Ratnasari



YAHYA YABO/MEDIA KALTIM

Pegawai, dokter RSUD dan fasilitator saat melaksanakan audit klinis TBC RO.

RSUD Bontang Audit Klinis TBC RO pada Tata Laksana Penanganan Penyakit

BONTANG – RSUD Taman Husada Bontang melakukan audit klinis pengawasan TBC RO bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim pada Kamis (9/11/2023) dengan melakukan pertemuan meeting zoom di lantai 4 gedung baru RSUD Bontang.

Direktur RSUD Taman Husada Bontang, dr Suhardi, Sp.JP mengungkapkan kegiatan audit klinis TB RO atau TBC RO sebagai program pusat Kemenkes untuk melakukan pengawasan terkait tata laksana penanganan penyakit TBC yang merupakan program pemerintah.

Ia juga mengatakan dengan keterlibatan harus melibatkan berbagai lintas sektor seperti di rumah sakit, Puskesmas untuk pengobatan dan perlu sisi lainnya untuk edukasi dan rehabilitasi.

“TBC ini diminimalkan atau bahkan dihilangkan. Masalah TBC ini perlu multisektor untuk penanganannya. Hari ini audit klinis yang dimaksudkan dari Kemenkes berharap agar tatalaksana atau pengobatan bisa berjalan sesuai SOPnya dan ini juga merupakan momen untuk konsultasi bagi rumah sakit di daerah agar memberikan masukan,” kata dr Suhardi kepada Mediakaltim, Kamis (9/11/2023).

Selanjutnya, dr Suhardi mengatakan RSUD Bontang merupakan rumah sakit rujukan bagi pasien TBC yang memerlukan pengobatan lebih lanjut.

“Karena RSUD Bontang terkait pengobatan TBC tetap menjadi rujukan. Terutama bagi pasien TBC dengan Resisten Obat, pasien TBC dengan komplikasi dengan penyakit lainnya yang harus dirujuk ke RSUD,” jelasnya.

Ia mengatakan setelah kegiatan audit klinis ini, pegawai RSUD Bontang yang menangani dan pemberi pelayanan penyakit TBC dapat mendapatkan tambahan ilmu terkait tata laksana penanganan TBC.

“Harapannya teman-teman sebagai pemberi layanan dapat menambah ilmu. Adanya penyempurnaan terkait kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kegiatan TBC ini kan sudah dilaksanakan mengenai pelaporannya, pelayanannya. Itu semua telah dilaporkan,” pungkasnya.

Audit klinis TBC RO di RSUD Bontang ini dihadiri oleh fasilitator dinas kesehatan Provinsi Kaltim, dr Parluhutan Dolly Siregar, Sp.P dan Guruh Wicaksono. (adv/yah)

Penulis: Yahya Yabo
Editor: Nicha Ratnasari



TOYOTA LET'S GO BEYOND

— Come join us for New Avanza and New Veloz @auto2000_bontang —

LET'S TEST DRIVE!

EZ Deal
Get Your Toyota, Upgrade Your Style

DAPATKAN UNDIAN TEST DRIVE

AUTO2000 BONTANG
Jl. Bigas Kencana No. 116A, Sebelah Kiri, Bontang Barat, Kota Bontang Kalimantan Timur

Scan QR CODE Test Drive Pada Aplikasi M-TOYOTA

DOWNLOAD APLIKASI M-TOYOTA

Urusan Toyota lebih mudah!

AUTO 2000
member of ASTRA

TOYOTA LET'S GO BEYOND

BOOKING THS SAJA

BTS
di Digiroom

THS Sama Lengkapnya Dengan Bengkel

DAPATKAN GRATIS 1st OLI TMO SYNTETIC SETIAP SERVICE BERKALA*

Mekanik Professional | Memenuhi SOP Kesehatan Part Original | Tanpa Biaya Kunjungan | Bergaransi

Kode Promo
BTSOLI

*Syarat dan ketentuan berlaku

Informasi - Call/WA :
Adi S : 0822-5435-0088

AUTO 2000
member of ASTRA

Bontang



YAHYA YABO/MEDIA KALTIM

dr Suhardi, Sp.JP saat ditemui Mediakaltim.com.

HUT RSUD Bontang ke-21, Bakal Launching Penilaian Kebugaran bagi Karyawan

BONTANG – Direktur RSUD Taman Husada Bontang mengatakan pelaksanaan HUT ke-21 RSUD Taman Husada akan dilaksanakan dan berpusat di RSUD Bontang. Pada pelaksanaan HUT RSUD nantinya akan ada launching Sistem Kebugaran untuk memberikan penilaian mengenai kebugaran karyawan atau staf RSUD Bontang.

Direktur RSUD Taman Husada Bontang, dr Suhardi, Sp.JP menjelaskan bahwa kegiatan HUT ke-21 RSUD Bontang akan dilaksanakan pada

12 November 2023 mendatang yang berpusat di RSUD Bontang yang nantinya akan ada launching Sipgar.

“Kegiatannya akan ada senam bersama. Ada launching Sipgar atau upaya agar kita lebih buger sebagai tenaga kesehatan. Sipgar itu semacam penilaian kebugaran untuk karyawan,” jelasnya kepada Mediakaltim.com.

Selanjutnya, ia mengatakan HUT ke-21 merupakan momen memberikan kemeriahan kepada karyawan dan staf RSUD Bontang.

“Momen HUT RSUD sebagai wadah dalam memberikan kemeriahan juga sebagai tempat menjalin komunikasi agar kembali akrab, solid dan menjalin kebersamaan. Untuk penilaian kebugaran akan diterapkan pada karyawan RSUD Bontang, saat HUT nanti sifatnya masih launching,” terangnya. (adv/yah)

Penulis: Yahya Yabo

Editor: Nicha Ratnasari

radar.
MEDIA
MEDIA KALTIM GROUP

www.radarbukota.com | www.radarkutim.com
www.radarkukar.com | www.samarinda.com
www.radarberau.com | www.radar.paser.com | www.radarballikpapan.com

INFO & PEMASANGAN IKLAN
CP. 0853 4894 3982

Hilang, Sepatu Sang Calon (2)

Oleh : MUTHI MASFU'AH

ENTAH dengan alasan yang belum aku memahami, Allah menetapkan dia menjadi bagian terbaik di hati dan pikiranku. Padahal mencintaimu tidak pernah ada dalam rencanaku. Entah seberapa besar aku mencintai dan menyayangimu sampai-sampai aku lupa cara mencintai lagi orang lain. Dengan mengingatmu saja, sudah membuatku tersenyum. Bahkan kadang menetes air mata untuk menahan rindu. Bahkan tiga bulan, dia hilang tanpa kabar.. rasa itu tak kunjung hilang bersama orang yang menawannya.

Mas, kamu dimana?

Tanti menuliskannya dalam selembar kertas. Lalu kertas itu, ia bentuk menjadi kapal... ia hanyutkan di pinggir sungai yang arusnya cukup deras... dan tak lama kapal pun menghilang...

Ingatan Tanti tak lepas dengan kejadian beberapa bulan lalu..

Ibu bersikeras, belum menerima lamaran Mas. Sementara Ayah menyerahkan sepenuhnya pada Ibu.

"Value wanita itu ada pada integritasnya, teguh dengan pendiriannya, kuat pada prinsipnya, dia konsisten dengan apa yang dia katakan, sejalan dengan perilakunya. Pendiannya teguh dan tak goyah, prinsipnya kuat dan tak mudah terbawa arus." Ibu dengan gaya tegasnya.

"Menjadi wanita yang ber-value itu memang harus berpendidikan tinggi. Meski sulit menurut sebagian wanita, tapi asalkan ada tekad dan niat sungguh-sungguh maka bisa menjadikan wanita itu berilmu tentu saja ilmu yang paling penting adalah ilmu agama di samping ilmu-ilmu yang lain. Tanti sendiri masih belum lulus S1, masih jauh perjalanan."

Ibu menghela nafas, tak lama ia melanjutkan lagi, "Wanita yang ber-value dia tidak haus akan pujian laki-laki, tidak baper sana-sini untuk dikagumi, karena kelasnya berbeda. Bukan sibuk mencari tapi sibuk menjadikan wanita yang berkualitas karena selernya juga berkualitas bukan yang obral dan *best seller*."



Kalau ibu yang berbicara, aku tak mampu menyela. Aku memilih diam mendengarkan nasehat ibu. Ayah pun sangat menghargai Ibu. Karena Ibu banyak mengurus rumah tangga ini, apalagi sejak ayah pensiun PNS.

Aku pun belajar menghargai Ibu, termasuk keputusan ibu. Menunda menerima lamaran Mas, sampai aku lulus S1, 2-3 tahun lagi...

Aku sepatu butut dan sepatu Jim Joker, sepatu keren berwarna kuning kunyit pemberian Tanti sebagai kenang-kenangan untuk Mas, hanya mampu berdiam sedih. Karena majikanku sudah cukup usia untuk menikah dan Tanti adalah pilihan yang tepat untuk majikanku.

Aku tidak sesenang itu, aku hanya belajar mengendalikan perasaanku. Aku tidak seikhlas itu, aku hanya belajar menerima sesuatu yang tidak bisa aku ubah. Aku tidak sekuat itu, aku hanya belajar menerima semua menjadi takdirku. Aku tidak sepisah itu, aku hanya percaya di setiap doa yang dilantirkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Aku yakin itu.

Goresan pena Tanti pada sebuah kertas... kembali kertas itu, ia bentuk menjadi kapal dan... ia hanyutkan di

pinggir sungai yang arusnya cukup deras..

Berulang kali Tanti lakukan.. Beriring bulan yang terus berganti.

"Serapat-rapatnya kamu menyembunyikan diri, pasti ada lelaki baik yang akan menemukanmu kelak, dia akan datang dengan cara yang baik dan dia akan melihatmu dengan iman bukan dengan hawa nafsu. Tersembunyinya apapun dirimu, kelak Allah akan mempertemukan ia padamu," nasehat Lala agar Tanti lebih tegar.

"Sebaliknya sebesar apapun usahamu, untuk menampakkan diri jika Allah tidak menghendaki datang, maka ia tidak akan datang padamu." Lala terus menasehati dengan bahasa lembutnya, tak kalah dengan Tanti yang juga lembut.

Tanti menghela nafas, sambil matanya lurus menatap laut... Saat sore aku bersamanya.

"Jangan paksakan seseorang untuk cepat segera pulih dari pilu dan luka hatinya. Jangan pula membuat ia menjadi bukan dirinya, ketika harus mencoba menghapus lagi di hatinya, untuk satu nama." Mata Tanti kini berkaca.

Entah apa istimewanya Mas, sampai Tanti begitu sangat kehilangan, ketiak Mas tiga bulan tak ada kabar. Lala bergumam, ia tidak akan pernah faham..

"Sabar Lala, beri aku waktu yang cukup untuk tegar, tetaplal ada dan terus yakinkan diri aku. Teruslah menjadi telinga utama dan bahu yang senantiasa menerima keluh kesahku La..."

Tanti mengambil selembar kertas lagi. Ia menuliskan laranya...

Biarkan rasa itu tumbuh dengan sendirinya, biarkan cinta itu mekar pada waktunya. Bukankah, setelah patah seseorang butuh kembali menemukan dirinya butuh lepas dari duri lara yang menancap di dalam hatinya? Sebab penyembuh rasa sakit bukan hanya tentang siapa yang selalu bersama, namun siapa yang berhasil membuatnya kembali percaya bahwa denganmu ia akan selalu bahagia dan memulihkan dari dukanya.

Aku mati-matian ingin melupakan, dan aku tahu bahwa Allahlah meletakkan cinta dalam hatiku. Tidak ada yang bisa mengambil dari hatiku kecuali-Nya. Jika seseorang terus berada dalam hatiku, maka aku akan terus berdoa pada-Nya sebab Allah menaruh

cinta di hatiku, pasti karena sebuah alasan.

Kertas itu ia lipat membentuk kapal, dan ia larutkan lagi di atas sungai yang deras... sederas air mata Tanti yang senantiasa tumpah... Tanti, serapuh itu... Lala tak kuasa...matanya kabur dibenuhi buliran air. Ia tak tega melihat Tanti.

Hati Tanti terlanjur tertawa. Entah bagaimana hati Mas sesungguhnya, ketika ia berkomitmen akan menunggu Tanti, sampai kapan pun tak akan menikah kecuali dengan Tanti... tapi nyatanya tiga bulan ini, ia tak ada kabar. Hilang begitu saja... Bahkan media sosialnya, sudah banyak teman perempuan baru yang ia ikuti dan saling like. Aku tak habis pikir... Lala terus tak faham.

Hidup kita adalah waktu yang dipinjam, harta kita adalah amanah yang dipercaya dan semua yang dimintai pertanggungjawaban karena umur kita layaknya es batu terpakai atau tidak pasti akan meleleh

dan mencair dan tetap akan terus berkurang.

Aku, tidak tahu... Apakah kamu menganggap aku sebagai salah satu dari sekian banyak wanita yang kamu cari dan singgahi... Mungkin aku hanya sebatas rindang tempatmu berteduh sejenak, sedangkan untukku... kamu adalah sebuah istana yang tak bisa membuatku beranjak pergi...

Tanti kembali menuliskannya dalam selembar kertas... kertas itu dilipat menjadi kapal, dan dilarutkan dalam air sungai yang deras.

Biarkan rasa itu tumbuh dengan sendirinya, biarkan cinta itu mekar pada waktunya. Bukankah, setelah patah seseorang butuh kembali menemukan dirinya butuh lepas dari duri lara yang menancap di dalam hatinya? Sebab penyembuh rasa sakit bukan hanya tentang siapa yang selalu bersama, namun siapa yang berhasil membuatnya kembali percaya bahwa denganmu ia akan selalu bahagia dan memulihkan

dari dukanya.

Aku menggenggam tangan Tanti, aku menunjuk ke langit. Ada Allah di sana yang mengatur segalanya. Bahkan lebih indah, sangat indah takdir yang ia greskan untuk kita...

Sementara di seberang sana, sepatu butut itu kini sedih dan menyendiri... Jim Joker kunyit tampan itu sudah berpindah majikan. Sepatu butut itu tidak tahu kapan akan bertemu lagi dengan Jim Joker, yang selalu membawanya bahagia dan mengingatkan pada sosok Tanti, gadis berjilbab yang gagal dilamar majikannya. (*)

SPESIAL PROMO GANTI OLI MESIN
* TOYOTA MOTOR OIL

Khusus Taxi Online & Travel

GUARANTEE PALING HEMAT GUARANTEE

Informasi - Call/WA :
Adi S : 0822-5435-0088

Drusen Toyota lebih mudah!

AUTO 2000
member of ASTRA

Bontang



MERCURE

HOTELS

SAMARINDA



KARNAVALL Batik Nusantara

Rayakan warisan budaya Batik bersama
ALL - Accor Live Limitless di Indonesia.

Nikmati sarapan gratis dan dapatkan
harga khusus serta pengalaman berbeda

Pesan & menginap hingga 31 Desember 2023.

Book, stay, enjoy
THAT'S ALL.COM